



Kejari Limpahkan Kasus Kredit BPR Bank Cirebon ke Pengadilan

HALAMAN 9

Pramuka Harus Jadi Generasi Tangguh, Mandiri, dan Peduli

HALAMAN 6

Komisi IV DPRD Bandung Barat Minta Disdik Jaga Kondisi Sekolah

HALAMAN 4



SURAT KABAR

UPDATE BERITA TERKINI: [HTTPS://NUSANTARA-NEWS.COM](https://nusantara-news.com)

NUSANTARA NEWS

Mengungkap Dibalik Fakta

EDISI ♦ AGUSTUS - SEPTEMBER 2026 ♦ TAHUN IX

Email : nusantaraneews234@gmail.com



KDM Dorong Parpol Kawal Pembangunan Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulya, yang biasa disapa KDM mendorong penguatan kemitraan antara pemerintah provinsi dan partai politik untuk bersama-sama mengawal agenda pembangunan di Jawa Barat.

Dedi mengatakan kemitraan tersebut penting, terutama dengan partai politik yang memiliki keterwakilan di DPRD Jawa Barat serta selama ini aktif menjalin komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Harapan bisa bersama menuntaskan konsepsi dan teknokrasi pembangunan di Jawa Barat. Selama ini komunikasi dengan pimpinan partai, DPD, fraksi, dan kami juga melihat dinamika di DPRD juga baik," ujar Dedi di Bandung, Selasa (25/8) lalu.

Pernyataan itu disampaikan Dedi saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) ke-VI Partai Demokrat Jawa Barat di Kota Bandung. Dalam Musda tersebut, Anton Sukartono Suratito ditetapkan secara aklamasi sebagai calon Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat periode 2026-2031.

Ke Halaman 11

Prabowo Guyon ke Menteri: Tak Sanggup Bekerja, Silakan Minggir

PRESIDEN Prabowo Subianto melontarkan gu-rauan kepada para menteri di Kabinet Merah Putih agar menjalankan tugas dengan baik.

Ia mengingatkan bahwa banyak pihak yang disebut siap menggantikan posisi mereka jika tidak mampu

menjalankan tanggung jawab. "Yang tidak sanggup boleh minggir, banyak yang ingin menggantikan saudara," ujar Prabowo sambil tertawa saat meresmikan peluncuran program nasional Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp di Jembrana, Bali, Selasa (25/8).

Prabowo mengatakan para menteri di Kabinet Merah Putih harus siap bekerja keras karena hampir tidak ada hari libur. Bahkan, hari libur nasional tetap dimanfaatkan untuk menjalankan agenda pemerintahan.

Ia mencontohkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada Selasa (25/8) lalu. Meski merupakan hari libur nasional, pemerintah tetap bekerja dengan meluncurkan program PLTS 100 GWp.

"Hari ini hari penting, walaupun libur, walaupun Maulid Nabi, kita berjuang untuk rakyat kita. Memang di Kabinet Merah Putih mungkin hampir tidak ada tanggal merah dan itu risiko, risiko pengabdian," kata Prabowo.

Ke Halaman 11



Revitalisasi SMPN 2 Cimanggung Rp2,49 M Disorot

SUMEDANG, (NN).— Proyek revitalisasi SMP Negeri 2 Cimanggung, Kabupaten Sumedang, menjadi sorotan setelah diduga masih menggunakan rangka baja ringan lama pada sebagian bangunan. Padahal, menurut salah seorang sumber yang enggan disebutkan namanya, rangka baja ringan tersebut seharusnya dibongkar dan diganti dengan yang baru demi menjamin kekuatan konstruksi dan keamanan bangunan.

"Sekitar empat ruang kelas diduga masih menggunakan rangka baja ringan lama. Rangka tersebut hanya ditutupi dengan pemasangan genteng metal baru, bukan diganti dengan material baru sebagaimana mestinya," ujar sumber kepada NN.



SCAN UPDATE TERKINI

Berdasarkan hasil investigasi awak media di lapangan, ditemukan sejumlah dugaan kegagalan dalam pelaksanaan proyek revitalisasi tersebut. Di antaranya dugaan penggunaan kembali rangka baja ringan lama, pekerjaan pemasangan genteng yang diduga diborongan kepada pihak lain, serta dugaan penjualan kayu dan genteng bekas hasil pembongkaran.

Menanggapi hal tersebut, Fajar, yang disebut sebagai perwakilan panitia pelaksana dari pihak sekolah, menjelaskan bahwa penggunaan rangka baja ringan lama dilakukan karena kondisinya dinilai masih layak digunakan.

Ke Halaman 11

SMPN 2 Ngamprah Rusak dan Tak Terawat, Jeje: Ke Mana Dana BOS?

BANDUNG BARAT (NN).— Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail bersama Komisi 4 DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) melakukan monitoring langsung ke SMP Negeri 2 Ngamprah, Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Senin (24/8/2026) lalu.

Kunjungan tersebut dilakukan menyusul viralnya kondisi sekolah tersebut di media sosial beberapa hari sebelumnya.

Dalam unggahan yang bere-

dar, terlihat sejumlah fasilitas sekolah dalam kondisi memprihatinkan. Di antaranya toilet dan urinoir tidak dapat dipakai, papan tulis rusak, kaca jendela pecah, plafon berlubang, hingga sejumlah ruangan tampak kotor dan tidak tertata.

Tak hanya persoalan fasilitas, media sosial juga sempat diramaikan dengan unggahan terkait dugaan pungutan liar (pungli) biaya Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada Juni 2019 serta

dugaan pelecehan terhadap siswa.

Jeje bersama jajaran Komisi 4 DPRD KBB kemudian berkeliling ke sejumlah bagian sekolah untuk memastikan langsung kondisi yang menjadi sorotan publik tersebut.

Jeje mengaku heran melihat kondisi SMPN 2 Ngamprah yang mengalami kerusakan, terutama karena sekolah tersebut setiap tahun mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Ke Halaman 11



REDAKSI NusantaraNews membuka ruang bagi para penulis, akademisi, pemerhati sosial, budayawan, mahasiswa, maupun masyarakat umum untuk menyampaikan gagasan, pemikiran, dan karya tulis yang konstruktif kepada publik. Kami menerima berbagai jenis naskah, mulai dari tulisan opini, artikel, esai, cerpen, puisi, hingga karya fiksi lainnya yang memiliki nilai edukatif, inspiratif, informatif, dan tidak bertentangan dengan norma hukum maupun etika jurnalistik yang berlaku. Melalui rubrik ini, NusantaraNews berharap dapat menjadi wadah bagi lahirnya ide-ide segar, kritik yang membangun, serta karya sastra yang mampu memperkaya khazanah literasi bangsa. Setiap naskah yang masuk akan melalui proses seleksi dan penyuntingan sesuai kebutuhan redaksi tanpa mengubah substansi utama tulisan. Bagi yang berminat mengirimkan karya, naskah dapat dikirimkan melalui email: redaksi@nusanantara-news.com

Kursi Ketum PBNU Jadi Rebutan? Muktamar NU ke-35 Ternoda Kericuhan

Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang semestinya menjadi panggung kebesaran organisasi, bukan arena saling dorong.

Namun apa yang terjadi di Pondok Pesantren Bah-rul Ulum, Tambakberas, Minggu (30/8/2026), justru memperlihatkan wajah yang memprihatinkan.

Massa terlibat aksi saling dorong hingga adu jotos dengan petugas keamanan dan Banser. Ironisnya, kericuhan itu pecah ketika forum sedang membahas sesuatu yang sangat penting: tata tertib pemilihan Ketua Umum PBNU.

Pertanyaannya sederhana: sebegini gentingkah perebutan kursi Ketua Umum PBNU sampai perbedaan pendapat harus dibayar dengan kepala tangan?

Jika jawabannya iya, maka ada persoalan serius yang harus segera dibenahi. NU dikenal dengan tradisi musyawarah. Perbedaan pendapat bukan barang haram dalam tradisi organisasi ini. Justru dari perbedaan itulah keputusan seharusnya lahir. Tetapi ketika perbedaan berubah menjadi geruduk-gerudukan, teriakan, dorong-dorongan, bahkan adu jotos, maka ada sesuatu yang sedang bergeser.

Yang bergeser bukan sekadar ketertiban forum, tetapi juga etika dalam berorganisasi.

Panitia menyebut massa yang terlibat bukan peserta resmi muktamar. Pernyataan ini justru menimbulkan pertanyaan yang lebih serius. Jika mereka memang bukan peserta, lalu untuk kepentingan siapa mereka datang? Siapa yang menggerakkan? Siapa yang membiayai? Dan siapa yang merasa berkepentingan membuat forum muktamar gaduh?

Pertanyaan-pertanyaan itu tidak boleh disapu di bawah karpet.

Apalagi di tengah kericuhan terlihat sejumlah orang mengenakan atribut yang dikaitkan dengan salah satu bakal calon Ketua Umum PBNU. Tentu saja, keberadaan atribut tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa bakal calon bersangkutan terlibat atau memerintahkan aksi. Tuduhan tanpa bukti hanya akan memperkeruh keadaan.

Tetapi publik juga tidak boleh diminta pura-pura tidak melihat.

Dalam kontestasi politik organisasi, atribut, massa, dan tekanan jalanan bukan sekadar pemandangan. Semuanya bisa menjadi sinyal tentang bagaimana sebuah pertarungan sedang dimainkan.

Jika perebutan kepemimpinan mulai menggunakan tekanan massa untuk memengaruhi forum, maka yang sedang dibangun bukan kepemimpinan, melainkan demonstrasi kekuatan.

Dan NU tidak membutuhkan itu.

NU membutuhkan pemimpin yang mampu meyakinkan orang melalui gagasan, bukan melalui banyaknya massa yang berdiri di luar gedung sidang. NU membutuhkan pemimpin yang bisa memenangkan hati



Oleh: **RUSDIANSYAH**

peserta muktamar, bukan pemimpin yang namanya identik dengan keributan.

Di titik ini, Banser juga harus bercermin.

Tugas keamanan memang penting. Arena muktamar harus dijaga agar tidak disusupi atau diganggu oleh pihak yang tidak berkepentingan. Tetapi keamanan tidak boleh berubah menjadi kekerasan yang kehilangan kendali. Banser harus tetap menjadi simbol ketertiban, bukan bagian dari tontonan bentrokan.

Sebab jika massa berhadapan dengan Banser dan yang terlihat ke-

mudian adalah adu pukul, publik tidak akan sibuk menghitung siapa yang memulai. Yang terlihat hanyalah satu hal: muktamar organisasi Islam terbesar di Indonesia berlangsung dengan kekerasan.

Itu bukan citra yang membanggakan.

Lebih jauh, para elite NU semestinya memahami bahwa jabatan Ketua Umum PBNU bukanlah hadiah politik yang pantas diperebutkan dengan segala cara. Jabatan tersebut membawa mandat besar dari jutaan warga nahdliyin.

Karena itu, siapa pun yang berada di balik mobilisasi massa dan kericuhan harus berani mempertanggungjawabkan tindakannya.

Jangan sampai setelah keributan reda, semua pihak pura-pura tidak tahu. Jangan sampai yang kemudian muncul hanya pernyataan normatif tentang persatuan, sementara di belakang layar masing-masing kubu tetap memainkan strategi untuk memenangkan pertarungan.

Kalau memang ingin menjadi pemimpin NU, tunjukkan kedewasaan sejak proses pemilihannya.

Jangan bicara persatuan sambil mengerahkan massa. Jangan bi-

cara akhlak sambil membiarkan kekerasan. Jangan bicara tradisi pesantren jika musyawarah kalah oleh kepentingan kursi.

Muktamar adalah tempat menentukan masa depan organisasi, bukan tempat mempertontonkan siapa yang paling kuat.

Pada akhirnya, siapa pun yang memenangkan pemilihan Ketua Umum PBNU akan menghadapi ujian yang jauh lebih berat setelah muktamar selesai. Ia harus menyatukan kembali kelompok-kelompok yang selama proses pemilihan mungkin saling berhadapan.

Dan di sinilah persoalannya.

Pemimpin yang lahir dari proses yang penuh luka akan memiliki pekerjaan besar untuk menyembuhkan organisasinya sendiri.

Muktamar NU ke-35 seharusnya dikenang karena gagasan besar, bukan karena adu jotos. Karena jika sejarah muktamar justru lebih banyak mencatat kericuhan daripada gagasan, maka semua pihak perlu bertanya:

*Untuk apa sebenarnya kursi Ketua Umum PBNU diperebutkan, jika demi kursi itu marwah organisasi justru diper-taruhkan? *****



Diterbitkan Berdasarkan UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers oleh

PT. TREE NUSANTARA NEWS

Badan Hukum: AHU-052148.AH.01.30.Tahun 2025 - NIB: 2609250117203 - NPWP: 1000000005753089

PENASEHAT HUKUM: Dino Deer Mallau, SH, H. Moch. Darkan, SH, MM, Ir. D. Romli Sihombing, SH, MH, Musa Darwin Pane SH, MH, Rizalman, SH, MMPH, Arie Candra SH **DEWAN PENASEHAT:** H.Asep Daman Amk, Drs.H.Entis Sutisna, Dr. Mulya Munajat, H.Ochjo, Agus Haris.SH KH.Enang, Alinudin (Aki) **DEWAN REDAKSI:** Waryat H,

Hikmat Budiman, A.Sudrajat, Edi Satya, Undang Nuryadin, Ayin T Suryana, Ramses, Ananto Wijaya, Furkon Muzahid Bangun **PIMPINAN UMUM:** Wiraatmadja **PIMPINAN REDAKSI:** Ayin T Suryana **WAKIL PIMPINAN REDAKSI:** Usep Syaripudin **PIMPINAN PERUSAHAAN:** Ginanjar Nirwan **BENDAHARA:** Reni Anggraeni **BAGIAN UMUM:** Jani Rusdiana, **SIRKULASI/KONTRIBUSI:** Iyan Septian, Dewi Setiawati, Kiki **IKLAN:** Nurul Insani, **SIRKULASI:** Robi, Taufik Rifaldi **KOORDINATOR LIPUTAN:** Agus **WARTAWAN :KOTA BANDUNG:** Oman Sulaeman, Wa Usep **CIMAHI:** Nana **KAB. BANDUNG BARAT:** Sudrajat, Nana, **KAB. BANDUNG:** Nur Tuti Fatimah, Suryana, Maman Somantri, Muhammad Ropi Sudarman, Asep, Fadjar Wildan Pratama, Obon Sobana **KAB. GARUT:** Mas Ali Nurdin alias Aki Koneron (*Kepala Biro Garut*), Linda Susana, Ajang Saeful Malik, Iyom, Didi Maman, Jaenul Mutakin, Mas Viktor W, Rudi Rahmat, Rika Herdiani, Endeng Yohana, Tamam Rusdi, Fitri Yani, Agus Gunawan. **KAVERWIL BANTEN:** Empep Erawan **KAB. BANTEN:** Asep HS **MAJALENGKA:** Hendra - Tono Mulyono **KAB. SUMEDANG:** Aris, Bah Irip, Lilis Herlina, Bah Eman **KAB.SUKABUMI:** Muhamad Suhendar **KAB.TASIKMALAYA:** Ade (Kepala Biro), Yugianto, Sholehudin **LINTAS DAERAH:** Agus L (Ketua Tim Investigasi), Roni L, Tedi Riswandi, Fajar M Ramdan, Suryanto, Tendi Supriadi, Fatar Panjaitan, Empang Supatman **LINTAS PRIANGAN:** Aris Supriadi, A Sulaeman, Agus R **BIRO KARAWANG:** Asep (Kabiro), Oom, Iyan Septian, Ade Hidayat **LINTAS KAJAKINPOL:** Dani Ramdani, **KEVERWIL JAMBI:** Rusdi Ansyah, **KEVERWIL RIAU:** Rendi Mustopa, **KEVERWIL SUMATERA:** Yuliadi Dermawan **ARTISTIK:** Maulana S **REKENING:** Bank BJB Cab. Majalaya No. 00183296-21100-BRI Cab.Cicalengka No.3773-01-024366-53-1, **ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA:** Jalan Raya Cikancung, Cicalengka Bojongsempur, Desa Hegarmanah, Kec. Cikancung, Kab. Bandung. Telp. 082123768088 **WEBSITE:** <https://nusanantara-news.com> **EMAIL:** nusantaraneews234@gmail.com **FB** <https://www.facebook.com/red.nusantsranews>

Nia Purnakania Dorong Aspirasi Warga Ciparay Masuk SIPD



KAB. BANDUNG (NN) – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jabar 2, Hj. Nia Purnakania, S.H., M.Kn., menggelar kegiatan Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran (TA) 2026.

Kegiatan yang mengangkat materi terkait Permendagri Nomor 4 Tahun 2026 tersebut berlangsung di Aula Pesantren Abdussalam, Kampung Babakan RT 01/RW 13, Desa Bumiwangi, Kec. Ciparay, Kabupaten Bandung, Sabtu (29/8/2026) lalu.

Kegiatan dihadiri ratusan peserta dari berbagai unsur masyarakat. Hadir pula Anggota DPRD Kabupaten Bandung sekaligus Ketua DPC

PDI Perjuangan Kabupaten Bandung, Yayat Sumirat, S.H., Kepala Desa Bumiwangi, pimpinan Pesantren Abdussalam, para pengurus PAC dan ranting PDI Perjuangan se-Kecamatan Ciparay, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Para peserta menunjukkan antusiasme tinggi dengan mengikuti pemaparan materi dan berdialog secara aktif mengenai berbagai isu yang berkaitan dengan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta pelaksanaan program pembangunan.

Dalam pemaparnya, Hj. Nia Purnakania, S.H., M.Kn., mengatakan bahwa kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerinta-

han merupakan salah satu tugas dan fungsi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.

“Selain pengawasan, ada tugas lainnya, yaitu membuat peraturan daerah atau legislasi, menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat bersama eksekutif atau budgeting, serta melakukan pengawasan atau controlling,” ujarnya.

Lebih lanjut, Nia mengatakan bahwa kegiatan tersebut juga menjadi momentum bagi dirinya untuk menampung dan menyerap aspirasi masyarakat yang nantinya dapat diwujudkan untuk direalisasikan pada tahun anggaran berikutnya.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah aspirasi disampaikan masyarakat. Salah satunya terkait kebutuhan pembangunan drainase di Jalan Raya Laswi, Desa Bumiwangi, yang merupakan ruas jalan berstatus jalan provinsi.

Selain persoalan infrastruktur, masyarakat juga menyampaikan aspirasi mengenai pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pengembangan pesantren, serta sejumlah kebutuhan pembangunan lainnya.

“Saya berharap berbagai usulan yang disampaikan masyarakat ini dapat dimasukkan dalam SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah), sehingga nantinya dapat menjadi bahan usulan dalam perencanaan pembangunan di tahun yang akan datang,” pungkasnya. **(Agus Rachmat)**



Toni Permana Dorong Rutilahu dan Infrastruktur

KAB. BANDUNG (NN). — Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi NasDem Daerah Pemilihan (Dapil) VI, Toni Permana, SH, menggelar kegiatan reses masa persidangan III Tahun 2025–2026 di ruang pertemuan RM Kurnia, Jalan Raya Laswi, Desa Bumiwangi, Kec. Ciparay, Kab. Bandung, Rabu (19/8/2026) siang lalu.

Kegiatan tersebut dihadiri lebih dari 100 orang yang berasal dari berbagai unsur masyarakat. Reses menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan secara langsung berbagai aspirasi, keluhan, serta kebutuhan kepada wakil rakyat.

Toni Permana, SH, menjelaskan bahwa reses merupakan salah satu fungsi utama anggota DPRD untuk menyerap dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Berbagai masukan yang diterima dalam kegiatan tersebut selanjutnya akan disampaikan dan diperjuangkan melalui pembahasan di tingkat pemerintahan.

“Hari ini kita melaksanakan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat. Ini merupakan bentuk konsolidasi kita. Saya sebagai wakil rakyat memiliki tanggung jawab untuk mendengar langsung keluhan dari warga

masyarakat,” ujar Toni.

Ia menambahkan, setelah kegiatan reses, agenda DPRD Kabupaten Bandung akan dilanjutkan dengan pembahasan anggaran perubahan pada awal September. Selanjutnya, pada pertengahan hingga akhir September, DPRD akan membahas anggaran murni Tahun 2027.

Menurut Toni, terdapat sejumlah program yang menjadi aspirasi masyarakat dan rutin diperjuangkan setiap tahun, di antaranya program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), Kelompok Usaha Bersama (KUBE) melalui Dinas Sosial, serta penerangan jalan umum (PJU).

“Untuk program yang memungkinkan setiap tahun kita dorong, pertama Rutilahu. Untuk Rutilahu yang diajukan melalui pokok-pokok pikiran (pokir), dalam setahun sekitar 20 sampai 30 unit,” jelasnya.

Selain Rutilahu, lanjut Toni, dirinya juga mendorong program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Dinas Sosial serta aspirasi terkait PJU yang menjadi salah satu bidang mitra kerjanya. “Untuk PJU ini menyangkut mitra kerja saya, khususnya Dinas Perhubungan. **(Agus Rachmat)**

Hadiat Tegaskan PKB Hadir Setiap Saat untuk Rakyat

KAB. BANDUNG, (NN).-Komitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat kembali ditegaskan Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil 1, Hadiat, S.Pd.I., saat melaksanakan reses masa persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di Aula Desa Cibodas, Kecamatan Pasirjambu, Sabtu (22/8/2026) lalu.

Hadiat yang akrab disapa Papap, sekaligus Wakil Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung, menjadikan reses bukan sekadar agenda rutin anggota DPRD. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk duduk bersama masyarakat, membangun silaturahmi, sekaligus menyerap secara langsung berbagai persoalan.

Menurut Hadiat, seorang wakil rakyat tidak cukup hanya hadir ketika momentum politik tiba. Kehadiran wakil rakyat harus dirasakan masyarakat melalui kerja nyata, komunikasi yang terus terjaga, serta keberanian memperjuangkan aspirasi masyarakat di lembaga legislatif.

“Bagi saya, reses ini bukan sekadar formalitas. Saya datang untuk



melihat, mendengar dan merasakan langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Aspirasi itu kemudian akan saya bawa dan perjuangkan di parlemen,” ujar Hadiat.

Ia menegaskan, masyarakat merupakan sumber utama dari setiap perjuangan politik yang dilakukannya. Karena itu, dirinya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap aspirasi yang disampaikan konstituen tidak berhenti hanya menjadi catatan dalam pertemuan. “Saya siap menampung aspira-

si dan siap memperjuangkannya. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, selama sesuai dengan kewenangan dan aturan yang ada, akan kita kawal bersama sampai sejauh mana bisa direalisasikan,” tegasnya.

Hadiat mengatakan, perjuangan tersebut juga menjadi bagian dari komitmen politik PKB yang menurutnya tidak boleh hanya hadir menjelang pemilihan umum.

Ia menegaskan PKB bukan partai politik lima tahunan yang hanya datang ketika membutuhkan su-

ara masyarakat. Sebaliknya, PKB harus terus berada di tengah-tengah masyarakat, mendengar persoalan rakyat dan memberikan manfaat melalui kerja-kerja politik yang nyata.

“PKB bukan partai politik lima tahunan. Kita tidak boleh hanya hadir ketika membutuhkan suara. Setelah masyarakat memberikan kepercayaan, maka kepercayaan itu harus dibayar dengan kerja dan pengabdian,” katanya.

Bagi Hadiat, prinsip tersebut sejalan dengan semangat PKB, yakni “Peduli Umat, Melayani Rakyat.” Kalimat tersebut, kata dia, bukan sekadar slogan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata, termasuk melalui perjuangan aspirasi masyarakat di DPRD.

“Peduli umat dan melayani rakyat harus kita buktikan dengan kehadiran. Ketika masyarakat memiliki persoalan, kita dengarkan. Ketika masyarakat memiliki kebutuhan, kita tangung. Dan ketika ada ruang untuk memperjuangkannya, kita perjuangkan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan terse-

but, Hadiat juga menegaskan bahwa wilayah PACIRA (Pasirjambu, Ciwidey dan Rancabali) menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam perjuangan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang menjadi kewenangannya.

Menurutnya, PACIRA memiliki arti penting dalam perjalanan politiknya. Selain menjadi bagian dari wilayah Dapil 1, masyarakat di tiga kecamatan tersebut telah memberikan kepercayaan dan dukungan yang besar kepadanya dalam kontestasi legislatif. “Pokir saya tentu kita prioritaskan untuk PACIRA. Tiga kecamatan ini merupakan bagian dari lumbung suara saya. Salah satunya Desa Cibodas yang memberikan dukungan suara cukup besar kepada saya,” jelasnya.

Namun, Hadiat menegaskan bahwa kedekatan politik dengan masyarakat tidak boleh dimaknai sebatas kepentingan suara. Dukungan masyarakat justru menjadi amanah yang harus dikembalikan dalam bentuk pengabdian dan perjuangan pembangunan. **(Tuti)**

Kopi Arabika Bandung Barat Kembali Tembus Pasar Dunia, Ekspor 4 Ton ke Arab Saudi

BANDUNG BARAT (NN).- Petani kopi Arabika Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali bisa tembus pasar dunia. Kali ini, kopi Arabika asal Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, berhasil ekspor 4 ton ke Arab Saudi. Sebelumnya, kopi Arabika Gununghalu bisa ekspor puluhan ton ke berbagai negara Eropa.

Pelepasan ekspor kopi Tangkuban Parahu Bandung Barat tersebut dilakukan Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail di halaman Gedung Utama Komplek Perkantoran KBB-Ngamprah, Sabtu (29/8/2026) lalu. "Hari ini kami melepas ekspor hasil petani kopi dari Lembang, tepatnya Cibodas, dengan total sebanyak 4 ton. Yang sangat menggembirakan bagi kami, ekspor ini dilakukan ke Arab Saudi," ujarnya. Demografi

Ekspor kopi, hasil pertanian di wilayah Lembang tembus pasar negara Timur Tengah merupakan pertama kalinya.

Asep berharap, para petani bisa menjaga kualitas maupun kuantitas produknya serta ke depannya, bisa lebih ditingkatkan.

"Tentunya, ini merupakan ekspor pertama ke Timur Tengah. Mudah-mudahan Pak Ananda, Pak Dikdik, dan Kang Adil bisa terus meningkatkan produknya. Mudah-mudahan tahun depan bisa ekspor ke Jepang," ucapnya lagi.

Ia menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang turut serta membantu produk kopi asal Band-

ung Barat sehingga berhasil menembus pasar Arab Saudi.

"Tentunya, saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala BI dan juga Bea Cukai Provinsi dan Pemprov Jawa Barat. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya untuk UMKM yang ada di Kabupaten Bandung Barat," ujarnya lagi.

Manajer Tonas Kopi sekaligus petani milenial, Dikdik Ramdani-syah, mengatakan perjalanan hingga produknya bisa diekspor secara mandiri tidak berlangsung singkat. Panduan & Petunjuk Perjalanan

Ia mulai menggeluti sektor pertanian dan pengolahan pascapanen kopi sejak 2015. Namun, baru pada 2026 dirinya dapat melakukan ekspor langsung ke luar negeri dengan mengurus seluruh kebutuhan dokumen secara mandiri.

"Alhamdulillah sekarang sudah rampung dan menemukan pembeli atau buyer langsung toko kopi di Riyadh, Arab Saudi," kata Dikdik.

Peluang ekspor tersebut bermula dari seorang rekan kerja yang berada di Arab Saudi. Rekannya kemudian mengenalkan produknya kepada calon pembeli hingga akhirnya terjadi komunikasi langsung melalui surat elektronik.

Sebelum mendapatkan pesanan, Dikdik terlebih dahulu mengirimkan lima jenis sampel kopi dengan metode fermentasi berbeda. Di antaranya menggunakan gula merah, stroberi, nanas, tanpa campuran, serta

fermentasi menggunakan ragi.

Dari berbagai sampel tersebut, kopi dengan metode fermentasi menggunakan buah nanas menjadi produk yang paling sesuai dengan selera dan spesifikasi calon pembeli di Arab Saudi.

"Awalnya kita kirim sampel dulu berupa pengolahan kopi fermentasi lima sampel. Hasilnya yang diterima kopi fermentasi nanas," ujarnya. Astronomi

Produk tersebut kemudian ditawarkan kepada buyer di Arab Saudi dan mendapat respons positif. Bahkan, pesanan awal yang diterima mencapai 25 ton.

Namun, karena keterbatasan kapasitas produksi dan kondisi yang belum memungkinkan, pihaknya baru sanggup memenuhi pengiriman tahap pertama sebanyak 4 ton.

"Awalnya, mereka melakukan pemesanan sebanyak 25 ton. Namun, karena situasi dan kondisi yang kurang memungkinkan, kami baru mampu menyanggupi pengiriman sebanyak 4 ton," ungkap Dikdik.

Berbeda dengan pengiriman sebelumnya yang dilakukan melalui pihak lain, ekspor kali ini dilakukan secara langsung dari petani kepada pembeli. Mulai dari pengurusan dokumen hingga proses ekspor dikerjakan sendiri oleh pihak Tonas Kopi.

Menurut Dikdik, proses melengkapi dokumen ekspor menjadi salah satu tantangan yang harus dilalui. Beruntung, sejumlah instansi terkait



memberikan pendampingan sehingga seluruh persyaratan dapat dipenuhi.

Untuk pengiriman 4 ton kopi tersebut, nilai transaksinya mencapai kurang lebih Rp800 juta. Pembayaran dilakukan melalui mekanisme transfer langsung. Demografi

Dikdik optimistis jumlah permintaan dari pasar Arab Saudi akan meningkat apabila produk yang dikirimkan sesuai dengan spesifikasi dan standar yang ditetapkan pembeli.

"Insyaallah, apabila kopi yang kami kirim sesuai dengan spesifikasi yang diberikan kepada buyer, tahun depan pesannya diperkirakan bisa meningkat dua hingga tiga kali lipat," katanya.

Saat ini, Tonas Kopi telah meny-

erap sekitar 50 ton kopi dari petani di Desa Cibodas. Jumlah tersebut dinilai masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi apabila permintaan ekspor terus meningkat.

"Kendala utama yang kami hadapi dalam proses produksi adalah ketersediaan bahan baku, khususnya ceri kopi," ujarnya.

Karena itu, pihaknya menargetkan kapasitas produksi dapat ditingkatkan dua hingga tiga kali lipat. Jika target tersebut terealisasi, kebutuhan bahan baku kopi diperkirakan dapat menembus lebih dari 100 ton.

Sementara itu, B2B Specialist Tonas Kopi, Adil Wijayakusumah, menyebut keberhasilan ekspor tersebut merupakan buah dari proses panjang yang dilakukan selama sekitar tiga tahun. (Sudrajat)

Komisi IV DPRD Bandung Barat Minta Disdik Jaga Kondisi Sekolah

BANDUNG BARAT (LN).-Kondisi SMPN 2 Ngamprah di Desa Tani-mulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB) menuai sorotan dengan kondisinya cukup memprihatinkan.

Kondisi sekolah tersebut, sempat viral di media sosial (medsos) sehingga Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail dan Komisi IV DPRD KBB, terjun langsung meninjau ke lapangan pada Senin (24/8/2026) lalu.

Ketua Komisi IV DPRD KBB, Nur Djulaeha mengatakan cukup prihatin melihat kondisi SMPN 2 Ngamprah tersebut.

Ia berharap di Bandung Barat, tidak ada lagi sekolah dengan kondisi memprihatinkan. Panduan Kota & Daerah Menurutnya, kondisi sarana dan prasarana sekolah bisa dikatakan menjadi representasi maju mundurnya dunia pendidikan.

"Ini untuk jadi catatan saya, dalam setiap rapat kerja dengan Disdik selalu menyampaikan untuk menjaga kondisi sekolah," ucapnya.

Ia menegaskan, jika dirinya tidak ingin ada lagi sekolah yang kumuh. Para murid harus merasa nyaman ketika proses belajar mengajar.

Menyikapi tentang kondisi SMPN 2 Ngamprah, Nur menyayangkan jika di sekolah itu penuh dengan coret-corean di dindingnya. Karena



kondisinya memang tidak terawat dengan baik. "Kita saja yang melihatnya tidak nyaman, apalagi anak-anak yang menjalaninya," ujarnya.

Kendati demikian, Nur menyatakan bersyukur karena Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, sudah langsung menganggarkan untuk beberapa titik. Astronomi

"Kita akan kawal dalam pembangunannya nanti di perubahan. Alhamdulillah hari ini kita berterimakasih kepada REI yang mendampingi pak bupati dan akan menyelesaikan untuk pembangunan MCK," tutur politisi dari Fraksi PKS ini. (Nana)

Pangdam Siliwangi Apresiasi Kinerja Kolonel Robil Syaifullah

BANDUNG (NN).-Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih, memberikan apresiasi kepada Kolonel Inf Robil Syaifullah atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian selama memimpin Komando distrik militer (kodim) 0618/Kota Bandung.

Selama menjalankan tugas, Kolonel Inf Robil Syaifullah telah berhasil memperkuat sinergitas dengan Pemerintah Kota Bandung, Polrestabes Bandung, serta berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan komunitas.

Demikian disampaikan Pangdam Mayjen TNI Kosasih saat serah terima jabatan (sertijab) Komandan Kodim (dandim) 0618/Kota Bandung dari Kolonel Inf Robil Syaifullah kepada Letkol Inf Albert Frantesca, yang berlangsung di Ruang Soedirman Makodam III/Siliwangi, Jalan Aceh No. 69, Kota Bandung.

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 45 orang tersebut dihadiri Pangdam III/Siliwangi beserta ibu, Kasdam III/Siliwangi, Irdam III/Siliwangi, Kapoksahli Pangdam III/Siliwangi, para Asisten Kasdam III/Siliwangi, Danrindam III/Siliwangi, para Dansat dan Kabalak jajaran Kodam III/Siliwangi, para Perwira Liaison Officer TNI AL dan TNI AU, Dandeninteldam III/Sili-



wangi, serta Ketua Persit KCK Daerah III/Siliwangi beserta pengurus. "Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Kolonel Inf Robil atas segala pengabdian, loyalitas, dan prestasi yang telah ditorehkan," ujar Mayjen Kosasih saat memberikan sambutannya.

Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih, menyampaikan bahwa Kota Bandung memiliki posisi strategis sebagai ibu kota Jawa Barat sekaligus pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, dan keberagaman masyarakat. Oleh karena itu, Kodim 0618/Kota Bandung memiliki peran penting dalam pembinaan teritorial, menjaga stabilitas keamanan, serta mempererat hubungan TNI dengan masyarakat.

Dan upaya tersebut dapat diwujudkan Kolonel Inf Robil melalui semangat "Bandung Rumah Kita Bersama", sekaligus memperkuat kehadiran TNI di tengah masyarakat dan menjaga kondusivitas wilayah.

Sementara kepada pejabat baru, Letkol Inf Albert Frantesca Pangdam menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas. Ia berharap pejabat baru dapat melanjutkan estafet kepemimpinan dengan membawa energi baru bagi kemajuan Kodim 0618/Kota Bandung. "Saya percaya Letkol Inf Albert Frantesca akan mampu melanjutkan estafet kepemimpinan ini dengan lebih baik, membawa energi baru untuk kemajuan Kodim 0618/Kota Bandung," ungkapnya. (Wa Usep)

KDS: Tak Ada Tempat Bagi ASN Bermain Judi

KAB. BANDUNG (NN).—Bupati Bandung Dadang Supriatna meminta data ASN yang terindikasi terlibat judi online segera diverifikasi. Jika terbukti merupakan ASN Pemerintah Kabupaten Bandung, KDS menegaskan akan memberikan tindakan tegas sesuai aturan disiplin ASN.

KDS mengatakan, informasi yang beredar menyebut 1.066 ASN yang berdomisili di Kabupaten Bandung terindikasi terlibat judi online sepanjang 2025, dengan nilai deposit sekitar Rp6,59 miliar. Angka tersebut meningkat dibandingkan 2024 yang tercatat 613 ASN dengan deposit sekitar Rp5,51 miliar. "Saya sangat kecewa. Tetapi sebagai kepala daerah, kita juga harus bertindak berdasarkan data yang benar dan asas keadilan," ujar KDS dalam keterangannya, Minggu (23/8/2026) lalu.

Menurutnya, data tersebut belum otomatis menunjukkan bahwa seluruh 1.066 orang merupakan ASN Pemkab Bandung. Karena itu, ia meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melakukan pencocokan by name by address dengan data kepegawaian Pemkab Bandung.

"Saya sudah meminta agar proses verifikasi dilakukan secepatnya. Jangan ditutup-tutupi dan jangan ada yang dilindungi," tegasnya.

KDS menegaskan, apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya ASN Pemkab Bandung yang terbukti bermain judi online, maka yang bersangkutan harus diproses sesuai ketentuan disiplin ASN dan peraturan perundang-undangan.



"Kalau terbukti ada ASN Pemkab Bandung yang melakukan judi online, saya minta diproses dan diberikan tindakan tegas," katanya.

Ia menilai keterlibatan ASN dalam judi online bukan persoalan sepele karena menyangkut integritas aparatur pemerintah. ASN, kata KDS, seharusnya menjadi teladan dalam disiplin, etika, tanggung jawab dan ketaatan terhadap hukum.

Karena itu, KDS meminta seluruh kepala perangkat daerah, camat dan pimpinan unit kerja memperkuat pengawasan terhadap pegawai. Sosialisasi mengenai bahaya judi online juga diminta ditingkatkan.

"Berhenti kalau masih ada yang bermain judi online. Berhenti sekarang juga. Jangan menunggu dipanggil atau diperiksa," ujarnya.

KDS juga membuka peluang Pemkab Bandung berkoordinasi dengan PPATK, aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk mem-

perkuat langkah pencegahan.

Menurutnya, persoalan judi online sudah berkembang menjadi masalah sosial dan ekonomi yang lebih luas. Ia mengutip data PPATK yang menyebut nilai perputaran dana judi online secara nasional mencapai sekitar Rp86,82 triliun pada semester I 2026, dengan deposit sekitar Rp22,05 triliun.

"Ini bukan lagi sekadar persoalan individu. Judi online sudah menjadi ancaman sosial dan ekonomi," katanya.

KDS mengingatkan, kecanduan judi online juga dapat memicu persoalan ekonomi pribadi, utang, gangguan konsentrasi kerja hingga berpotensi menimbulkan persoalan integritas.

Meski demikian, ia meminta masyarakat tidak langsung menghakimi seluruh ASN Kabupaten Bandung karena proses verifikasi masih berlangsung. **(Suryana)**

Bupati Bandung Ajak Warga Jadi Pahlawan Kekinian

KAB. BANDUNG (NN).—Bupati Bandung, Dadang Supriatna mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bandung untuk memaknai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menjadi "pahlawan kekinian" melalui karya, kerja nyata, serta kontribusi positif bagi keluarga, lingkungan, dan daerah.

Pesan tersebut disampaikan Bupati Bandung saat menjadi inspektur Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Upakarti, Soreang, Senin (17/8/2026) lalu.

Dalam amanatnya, bupati yang akrab disapa KDS tersebut mengatakan, peringatan kemerdekaan merupakan momentum untuk mengenang keberanian para pendahulu bangsa yang telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia 81 tahun lalu.

"Proklamasi menjadi titik awal lahirnya negara yang merdeka. Kemerdekaan juga menjadi sebuah manifesto peradaban bahwa bangsa Indonesia berhak menentukan nasibnya sendiri, membangun tanah airnya, dan menuliskan sejarahnya

dengan tinta perjuangan," ujar KDS.

Menurutnya, kemerdekaan bukanlah garis akhir perjuangan, melainkan awal untuk membangun tata kehidupan yang lebih baik.

Karena itu, semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui budaya kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas demi mencapai cita-cita bangsa, yakni masyarakat Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur.

"Jadilah pahlawan kekinian. Pahlawan di keluarga, di lingkungan tempat tinggal, di tempat kerja, di sekolah. Sebagai orang tua, guru, tenaga kesehatan, pelayan masyarakat, petani, buruh, pedagang, pengusaha, pemuda, pelajar dan mahasiswa, yang selalu jujur dan terus melakukan kebaikan serta kebermanfaatannya," katanya.

KDS juga mengajak masyarakat Kabupaten Bandung untuk menumbuhkan nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air melalui berbagai tindakan nyata, seperti menjaga persatuan, menghargai kebhinekaan, mencintai produk lokal, menjaga lingkungan, membayar pajak, mematuhi peraturan, serta berkontribusi terhadap kemajuan daerah. **(Obon)**



Forkopimcam Ciparay Bersih-Bersih Alun-Alun



KAB. BANDUNG (NN).—Semangat gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan tampak nyata di kawasan Alun-Alun Ciparay, Kabupaten Bandung. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Ciparay bersama berbagai unsur masyarakat menggelar kerja bakti membersihkan dan memelihara kawasan Alun-Alun Ciparay, Sabtu (29/8/2026) pagi lalu.

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak dengan melibatkan berbagai unsur pemerintahan, TNI-Polri, komunitas, pelajar, hingga masyarakat. Hal ini dilakukan se-

bagai upaya menciptakan ruang publik yang bersih, asri, dan nyaman bagi warga.

Kerja bakti dihadiri langsung Camat Ciparay Anjar Lugiya, S.IP., M.IP., Kapolsek Ciparay AKP Sugiharto Rudi Hartono, S.H., M.H., Danramil 2408 Ciparay Kapten Inf. Deni Iman Firdaus, S.H., para kepala desa dari 14 desa, para kepala UPT di wilayah Kecamatan Ciparay, anggota Koramil 2408 Ciparay, anggota Polsek Ciparay, Satpol PP, Linmas, pelajar, serta berbagai unsur lainnya.

Dengan penuh semangat, seluruh peserta bahu-membahu member-

sihkan setiap sudut kawasan Alun-Alun Ciparay yang menjadi salah satu ruang publik dan kebanggaan masyarakat Kecamatan Ciparay.

Dalam pelaksanaannya, peserta membagi tugas secara teratur. Sejumlah peserta memangkas ranting pohon yang sudah kering dan mengganggu pandangan, sementara lainnya memotong rumput liar di area taman serta mengumpulkan dan membuang sampah yang berserakan.

Meski cuaca cukup terik, semangat peserta tidak surut. Kebersamaan tersebut menjadi bukti bahwa menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama.

Camat Ciparay Anjar Lugiya mengatakan, kerja bakti tersebut merupakan wujud nyata kepedulian seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat terhadap kebersihan, kerapihan, serta keindahan Alun-Alun Ciparay.

"Alun-Alun Ciparay adalah wajah dan kebanggaan kita semua. Tempat ini menjadi ruang publik yang digunakan warga untuk beristirahat, berkumpul, dan beraktivitas. Karena itu, sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk menjaganya tetap bersih, asri, dan nyaman," ujar Anjar.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut kolaborasi Forkopimcam Ciparay dengan Forum Peduli Lingkungan (Forpeling) Kabupaten Bandung, Duta Lingkungan Kabupaten Bandung, Tim Apday, serta para pelajar.

"Hari ini kita Forkopimcam Ciparay dengan unsur lainnya berkolaborasi dengan Forpeling Kabupaten Bandung dan Duta Lingkungan Kabupaten Bandung melaksanakan kegiatan beberesih Alun-Alun. Kegiatan ini dikemas dalam Gerakan Oplosaan (Operasi Pembersihan Sampah Lingkungan Sasarengan) bersama Tim Apday, Duta Lingkungan, dan anak-anak sekolah," katanya.

Menurut Anjar, kegiatan menjaga kebersihan lingkungan di Kecamatan Ciparay bukan kali pertama dilakukan. Gerakan Oplosaan sebelumnya telah beberapa kali dilaksanakan di berbagai wilayah Kecamatan Ciparay dengan melibatkan sejumlah unsur dan komunitas.

"Alhamdulillah, kita tentunya berkolaborasi dan mudah-mudahan kegiatan ini berkelanjutan. Untuk kegiatan-kegiatan kebersihan, kami bersama seluruh unsur yang ada di Kecamatan Ciparay, utamanya para kepala UPT dan komunitas-komunitas yang ada, terus bersinergi dan berkolaborasi untuk membersih-

kan lingkungan, termasuk Alun-Alun Ciparay," jelasnya.

Ia menambahkan, kegiatan pembersihan Alun-Alun Ciparay kali ini juga menjadi momentum memperkuat kolaborasi bersama Forpeling Kabupaten Bandung dan Duta Lingkungan dengan melibatkan para pelajar.

"Kegiatan kali ini bukan sekadar pertama kali kita melakukan pembersihan di Alun-Alun, tetapi sudah sampai pada tahap berikutnya. Gerakan Oplosaan sendiri sudah beberapa kali kami lakukan di wilayah Kecamatan Ciparay. Seluruh unsur, baik komunitas, UPT wilayah, keagamaan maupun kepemudaan, sering kita libatkan untuk berkolaborasi," tuturnya.

Anjar berharap kesadaran menjaga kebersihan tidak berhenti pada kegiatan kerja bakti yang dilakukan pemerintah dan berbagai unsur masyarakat. Ia mengajak warga serta para pedagang yang beraktivitas di kawasan Alun-Alun Ciparay ikut menjaga dan merawat kebersihan lingkungan.

"Kami berharap setelah pelaksanaan kegiatan beberesih di Alun-Alun ini, warga maupun para pedagang juga memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan," pungkasnya. **(Agus Rachmat)**

Pramuka Harus Jadi Generasi Tangguh, Mandiri, dan Peduli

KAB. BANDUNG, (NN).- Bupati Bandung, Dadang Supriatna menjadi Pembina Upacara Peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat Kabupaten Bandung Tahun 2026 yang digelar di Dome Balerame, Soreang, Senin (24/8/2026) lalu.

Peringatan Hari Pramuka ke-65 tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat peran Gerakan Pramuka dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, mandiri, terampil, serta memiliki kepedulian terhadap bangsa dan lingkungan.

Secara nasional, Hari Pramuka ke-65 mengusung tema "Memantapkan Langkah Organisasi Mendukung Swasembada Pangan Menuju Indonesia Emas 2045." Tema tersebut menegaskan komitmen Gerakan Pramuka untuk terus berkontribusi dalam pembangunan bangsa, termasuk melalui penguatan ketahanan dan kemandirian pangan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati yang akrab disapa KDS tersebut



mengajak seluruh jajaran Gerakan Pramuka di Kabupaten Bandung untuk terus menjaga kekompakan dan semangat kebersamaan dalam menjalankan berbagai program serta pengabdian kepada masyarakat.

Menurutnya, semangat kebersa-

maan merupakan salah satu kekuatan penting dalam menghadapi berbagai tantangan sekaligus mendorong lahirnya generasi muda yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi daerah dan bangsa.

"Yang paling penting adalah kita

tetap kompak, tetap semangat, dan terus memberikan kontribusi terbaik," ujar KDS.

KDS menilai Gerakan Pramuka memiliki posisi strategis dalam membangun karakter generasi muda. Nilai-nilai kedisiplinan, kemandirian, gotong royong, kepemimpinan, dan kepedulian yang ditanamkan melalui kegiatan kepramukaan diharapkan dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi perkembangan zaman.

Ia juga mendorong seluruh anggota Pramuka di Kabupaten Bandung agar tidak hanya aktif dalam kegiatan kepramukaan, tetapi mampu menerapkan nilai-nilai Tri Satya dan Dasa Darma dalam kehidupan sehari-hari.

"Pramuka harus menjadi bagian dari solusi. Anak-anak muda harus memiliki semangat untuk berkarya, mandiri, peduli terhadap sesama, serta siap menghadapi tantangan masa depan," katanya.

Peringatan Hari Pramuka ke-

65 juga menjadi momentum untuk memperkuat kontribusi Pramuka dalam mendukung agenda pembangunan, termasuk swasembada pangan. Gerakan Pramuka secara nasional menempatkan dukungan terhadap kemandirian pangan sebagai salah satu fokus penting menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045.

KDS berharap momentum Hari Pramuka ke-65 dapat semakin memperkuat sinergi antara Gerakan Pramuka, pemerintah, dunia pendidikan, masyarakat, serta berbagai unsur lainnya dalam membangun generasi muda Kabupaten Bandung yang tangguh, produktif, dan berdaya saing. "Selamat Hari Pramuka ke-65. Mari kita terus jaga semangat kebersamaan, kekompakan, dan pengabdian untuk Kabupaten Bandung dan Indonesia," tuturnya.

Di sela-sela sambutan, KDS juga menyampaikan dirinya akan menindak secara tegas pelaku judi online (judol) khususnya di kalangan ASN.

"Per hari ini, ASN yang terbukti melakukan judol akan saya tindak tegas," ungkapnya.

Peringatan Hari Pramuka menjadi pengingat bahwa Gerakan Pramuka tidak hanya menjadi wadah pendidikan nonformal bagi generasi muda, tetapi juga bagian penting dalam mempersiapkan kader pemimpin bangsa di masa depan. **(Tuti)**

Pesta Siaga Pramuka Bandung Barat Wabup Asep Beri Pesan

BANDUNG BARAT (NN).- Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka Kab. Bandung Barat (KBB) menyelenggarakan Pesta Siaga bagi anggota Pramuka yang tersebar di sejumlah Kwartir Ranting (Kwarran) di Plaza Mekar Sari, Komplek Perkantoran KBB-Ngamprah, Kamis (27/8/2026) lalu.

Ratusan anggota Pramuka yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD), cukup antusias mengikuti kegiatan demi kegiatan.

Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail mengapresiasi Pesta Siaga yang merupakan puncak acara Bulan Bhakti Pramuka tahun 2026 di tingkat Bandung Barat tersebut. Panduan Kota & Daerah

"Tentunya atas nama Pemda KBB, Pak Bupati mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya (buat Kwarcab). Pokoknya pramuka keren, hebat, dan luar biasa," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Asep cukup luwes menyapa anak-anak Siaga. Pesan yang ia sampaikan sederhana namun bermakna.

"Kalian harus baik pada orang tua, bangun pagi-pagi, sholat (bagi umat Islam), jangan malas, belajar

dan belajar biar kelak bisa menggantikan kita-kita. Ini tujuh kebiasaan Anak Indonesia Hebat," ujarnya.

Asep juga berpesan kepada anggota Pramuka Bandung Barat, agar kegiatan yang dilakukan selama ini, tidak hanya bersifat seremonial saja.

Namun diharapkan, ada kegiatan berupa bantuan langsung kepada masyarakat.

Lebih lanjut Asep mengatakan, jika kegiatan Pramuka sangat positif. Terlebih kegiatan Pramuka untuk anak setingkat SD yang merupakan usia emas.

"Tentunya ini sangat berpengaruh secara kepribadian dan terus akan menjadi momen pemikiran anak usia SD ini untuk terus bisa meningkatkan pendidikan dan berprestasi yang tidak kalah pentingnya," imbuhnya. Panduan & Petunjuk Perjalanan

Ia juga menegaskan, jika Pemkab Bandung Barat Siap memberikan dukungan terhadap Pramuka. Dalam pandangannya, Pramuka telah berbuat 'bukan hanya kali ini saja, namun sudah berpuluh tahun mengabdikan kepada NKRI, termasuk KBB juga. **(Nana)**



:: Perkuat Literasi dan Kompetensi Guru

SMA IT Dipatiukur Ciparay Gelar IHT

KAB. BANDUNG (NN).-Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus menyesuaikan metode pembelajaran dengan dinamika pendidikan dan perkembangan teknologi, SMA Islam Terpadu Dipatiukur Ciparay menyelenggarakan kegiatan In House Training (IHT) di Aula sekolah setempat, Jumat (14/8/2026) lalu.

Kegiatan yang ditujukan khusus bagi tenaga pendidik di lingkungan SMA Islam Terpadu Dipatiukur Ciparay tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kompetensi guru menghadapi Tahun Ajaran 2026/2027, khususnya dalam penguatan literasi.

Kegiatan tersebut dihadiri Pengawas SMA, Drs. H. Agus Kusmana, M.Pd., selaku narasumber utama, Kepala SMA Islam Terpadu Dipatiukur Ciparay Iman Rohmanuddin, M.Pd., Wakasek Kesiswaan H. Agus Munawar, S.Pd.I., M.Si., serta staf dan para pengajar di lingkungan sekolah.

Kepala SMA Islam Terpadu Dipatiukur Ciparay, Iman Rohmanuddin,

M.Pd., melalui Wakasek Kesiswaan H. Agus Munawar, S.Pd.I., M.Si., saat ditemui Selasa (18/8/2026), mengatakan kegiatan IHT berlangsung dengan khidmat dan mendapat antusiasme tinggi dari para peserta.

"Alhamdulillah, acara berlangsung dengan khidmat dan penuh antusiasme. Para peserta menyimak materi yang disampaikan narasumber sekaligus aktif berdiskusi mengenai implementasi literasi dalam proses pembelajaran," ujar Agus Munawar.

Menurutnya, materi yang diberikan mencakup integrasi teknologi, metode literasi digital, serta pentingnya kemampuan guru untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Hal tersebut dinilai penting untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang relevan dan mendukung kebutuhan siswa.

Lebih lanjut, Agus Munawar menjelaskan, peningkatan kompetensi guru melalui kegiatan IHT mencakup sejumlah poin penting, di antaranya mengasah kemampuan pedagogik guru dalam menyampai-

kan materi berbasis literasi serta melakukan adaptasi dan sinkronisasi metode pengajaran untuk Tahun Ajaran 2026/2027.

"Literasi bukan sekadar kemampuan membaca dan menulis, tetapi merupakan fondasi bagi siswa untuk memahami dan mengolah informasi secara kritis. Melalui IHT ini, para guru dibekali strategi pembelajaran inovatif yang mampu mendorong daya nalar siswa dalam berbagai mata pelajaran," jelasnya.

Ia menambahkan, peningkatan kompetensi guru merupakan salah satu kunci utama dalam mencetak generasi yang cerdas dan literat. Dengan semangat "Berdikari", pihaknya berharap para guru SMA Islam Terpadu Dipatiukur Ciparay mampu menjadi garda terdepan dalam menghadirkan inovasi pendidikan.

Dengan dilaksanakannya kegiatan IHT tersebut, SMA Islam Terpadu Dipatiukur Ciparay menegaskan komitmennya untuk terus mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara akademis. **(Agus R)**



PKBM Hidayah Bojongsoang Jalani Visitasi Akreditasi Paket A, B, dan C

KAB. BANDUNG, (NN).-Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Hidayah Bojongsoang melaksanakan Visitasi Akreditasi untuk program pendidikan kesetaraan Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA. Kegiatan berlangsung selama tiga hari, mulai Rabu, 26 Agustus 2026 hingga Jumat, 28 Agustus 2026, bertempat di PKBM Hidayah Bojongsoang, Cibisoro RT 02 RW 08, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Visitasi akreditasi dilaksanakan oleh tim asesor, yaitu Yanti Susilawati, M.Pd. dan Dr. Hj. Atiyah Suharti, M.Pd. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya memastikan mutu penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di PKBM Hidayah Bojongsoang sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat.

Dihadiri Unsur Pemerintahan

Pembukaan kegiatan visitasi akreditasi dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan, pendidikan, keamanan, kesehatan, serta tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.

Hadir dalam kegiatan tersebut Penilik Dikmas Bojongsoang Yuyun Rosmawati, M.Pd., Kasi Sosbud Kecamatan Bojongsoang, Kanit Binmas Polsek Bojongsoang AKP Kurnia, S.H., Kepala Desa Bojongsoang, Kepa-

la Desa Bojongsari, perwakilan Dinas Kesehatan, Sekcam Dayeuhkolot, Tokoh Budaya Kabupaten Bandung H. Cuncun Ahmad Hudaya, M.Pd., Ketua PPSI Kabupaten Bandung H. Ali Nurdin, perwakilan Universitas Teknologi Digital, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda Kecamatan Bojongsoang, pengelola dan tutor PKBM Hidayah.

Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan dukungan dan kepedulian bersama terhadap keberadaan pendidikan nonformal sebagai salah satu bagian penting dalam memberikan akses pendidikan kepada masyarakat.

Awal dari Kelompok Belajar

Ketua PKBM Hidayah Bojongsoang, Dr. Cecep Hidayat, M.T., M.M., dalam sambutannya menyampaikan bahwa perjalanan PKBM Hidayah memiliki sejarah yang cukup panjang dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat.

Menurutnya, sebelum berdiri sebagai PKBM, pengelola terlebih dahulu menyelenggarakan kelompok belajar pada tahun 2000 hingga 2003 yang penyelenggaraannya berada di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dan dilaksanakan di Desa Bojongsoang.

“Pada tahun 2004 kemudian beralih menggunakan nama PKBM Hi-



dayah berdasarkan SK dari Camat Bojongsoang dan penyelenggaraannya dilaksanakan di Cibisoro. Selanjutnya pada tahun 2007 mendapatkan SK dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dan berada di bawah naungan Yayasan Hidayah,” ungkap Dr. Cecep Hidayat.

Perjalanan tersebut menjadi bukti komitmen PKBM Hidayah dalam menjalankan amanah pendidikan masyarakat secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, Dr. Cecep Hidayat menjelaskan bahwa keberadaan PKBM Hidayah tidak hanya berorientasi pada penyelenggaraan pen-

didikan kesetaraan, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih luas, yakni turut berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya peningkatan rata-rata lama sekolah masyarakat.

Selain memberikan layanan pendidikan Paket A, B, dan C, PKBM Hidayah juga berupaya membekali peserta didik dengan berbagai keterampilan yang dapat dimanfaatkan setelah menyelesaikan pendidikan.

“Tujuan kami adalah bagaimana pendidikan di PKBM dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain meningkatkan rata-rata lama

sekolah, peserta didik juga harus memiliki keterampilan yang dapat dimanfaatkan di dunia usaha maupun dunia industri, sehingga lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan,” jelasnya.

Menurutnya, pendidikan kesetaraan harus mampu menjadi jembatan bagi masyarakat untuk mendapatkan kesempatan belajar sekaligus meningkatkan keterampilan dan kemandirian.

Momentum Peningkatan Mutu

Visitasi akreditasi selama tiga hari tersebut menjadi momentum bagi PKBM Hidayah Bojongsoang untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan, mulai dari tata kelola lembaga, proses pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan, peserta didik, sarana prasarana, hingga berbagai program pengembangan lembaga.

Proses visitasi juga menjadi kesempatan bagi pengelola dan seluruh tutor untuk menunjukkan berbagai praktik baik yang telah dilaksanakan dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

PKBM Hidayah Bojongsoang berharap proses akreditasi ini dapat menjadi bagian dari perjalanan peningkatan mutu lembaga secara berkelanjutan. Dengan dukungan pemerintah, masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, tokoh pemuda, dunia pendidikan, dunia usaha dan berbagai pihak lainnya, PKBM Hidayah Bojongsoang berkomitmen untuk terus memberikan layanan pendidikan yang bermutu, inklusif, berkarakter, dan berorientasi pada keterampilan serta kemandirian peserta didik. **(Suryana)**

UPI dan MGMP Sosiologi Perkuat Kapasitas Guru Berbasis Riset

BANDUNG, (NN).- Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) bekerjasama dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sosiologi Kota Bandung menyelenggarakan Workshop bertema: "Penguatan Kapasitas Guru Sosiologi Dalam Pembelajaran untuk Meningkatkan Kualitas Pendampingan Penulisan Penelitian Siswa" di Gedung FPIPS UPI, Bandung, Jumat, 21 Agustus 2026 lalu.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Program Studi Pendidikan Sosiologi FPIPS UPI yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas guru dalam mengembangkan pembelajaran Sosiologi yang lebih kontekstual, kritis, dan berorientasi pada proses penelitian. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Program Studi Pendidikan Sosiologi UPI dan MGMP Sosiologi Kota Bandung dalam membangun ruang pengembangan profesional bagi guru.

Workshop menghadirkan dua pembicara yakni Siti Komariah, M.Si., Ph.D. dengan materi bertema “Pembelajaran Sosiologi Berbasis Riset” dan Dr. Wilodati, M.Si. dengan materi “Menyusun Proposal Penelitian Siswa yang Kompetitif.”

Siti Komariah menjelaskan bahwa pembelajaran berbasis riset dapat menjadi strategi untuk mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah para murid. Melalui pendekatan ini, murid-murid tidak sekadar meneri-



ma informasi, tetapi dilatih mencari dan menggunakan data, memeriksa bukti, mengembangkan pertanyaan, serta membangun argumentasi berdasarkan informasi empiris.

Pembelajaran Sosiologi berbasis riset juga dapat diterapkan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi pembelajaran di sekolah. Guru tidak harus langsung membawa para murid pada penelitian yang kompleks, melainkan dapat memulainya dengan menghadirkan hasil penelitian atau data sebagai sumber belajar, kemudian mengajak murid-murid untuk menganalisis bukti, hingga pada tahap melakukan penelitian sosial secara lebih mandiri dan terarah, ungkap Siti Komariah yang juga Sekretaris Program Studi Pendidikan Sosiologi UPI itu

Menurut Sosiolog UPI itu, Workshop dirancang untuk membantu para guru menerapkan riset dalam pembelajaran Sosiologi.

Peserta diajak mengembangkan satu materi Sosiologi melalui beberapa tingkat keterlibatan riset, mulai dari penggunaan data dan temuan penelitian sebagai sumber belajar, pengembangan kemampuan siswa dalam mengkritisi bukti, hingga memberikan pengalaman melakukan penelitian sosial.

Menurut Siti Komariah, guru dapat memilih materi Sosiologi yang relevan dengan pembelajaran di sekolah, kemudian menghubungkannya dengan fenomena sosial yang dekat dengan kehidupan para murid.

Sejalan dengan itu, Dr. Wilodati yang juga Ketua Tim PKM menjelas-

kan, interaksi antara Tim PKM UPI dan para guru dalam workshop juga menjadi ruang untuk mendiskusikan berbagai tantangan yang mungkin muncul ketika pembelajaran berlangsung.

Tantangan tersebut antara lain berkaitan dengan karakteristik materi, kemampuan dan kebutuhan peserta didik, ketersediaan waktu pembelajaran, hingga sumber daya yang dimiliki masing-masing sekolah. Karena itu, pendekatan berbasis riset perlu dikembangkan secara adaptif tanpa kehilangan tujuan utamanya, yakni membangun rasa ingin tahu, kemampuan berpikir kritis, serta keterampilan menggunakan bukti dalam memahami fenomena sosial.

Kolaborasi Program Studi Pendidikan Sosiologi FPIPS UPI dan MGMP Sosiologi Kota Bandung diharapkan tidak berhenti pada pelaksanaan workshop. Kerja sama tersebut diarahkan untuk berkembang menjadi bagian dari ekosistem akademik yang mendorong guru terus melakukan inovasi pembelajaran sekaligus mengembangkan kegiatan penelitian, ungkap Ketua Program Studi Pendidikan Sosiologi UPI itu.

Dr. Wilodati menyampaikan harapannya agar penguatan kompetensi riset melalui kegiatan PKM tersebut menghasilkan dampak positif dalam jangka panjang. Kompetensi riset tidak hanya penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga menjadi bagian dari pengembangan profesionalisme guru. **(Maman)**

Tenaga Pengajar Jawaban Kekurangan Guru di Cianjur

CIANJUR (NN).- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, menilai wacana perubahan status tenaga kependidikan menjadi tenaga pengajar memungkinkan diterapkan di Kabupaten Cianjur karena jumlah tenaga kependidikan dengan kebutuhan tenaga pengajar dinilai relatif berimbang.

Anggota Komisi IV DPRD Jabar Abdul Karim di Cianjur, Jumat, mengatakan hal tersebut dapat menjawab persoalan kekurangan tenaga pendidikan atau guru yang terjadi di sejumlah sekolah di Kabupaten Cianjur mulai dari jenjang SD hingga SMP harus segera mendapat solusi.

Persoalan kekurangan guru terjadi karena pemerintah daerah terbentur regulasi yang melarang sekolah maupun Dinas Pendidikan mengangkat tenaga honoror baru hingga tahun 2027.

“Kekurangan tenaga pendidikan di Cianjur saat ini terbentur aturan atau regulasi kalau sekolah ataupun Dinas Pendidikan tidak dapat mengangkat pegawai honoror,” katanya.

Saat ini, ungkap dia, pemerintah pusat tengah menggodok rencana peralihan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi ASN penuh, termasuk rencana perubahan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Tenaga kependidikan di Cianjur, tutur dia, rata-rata sarjana pendidikan dan memiliki kapasitas untuk menjadi tenaga pengajar, sehingga pihaknya meminta dinas pendidikan dapat melakukan pemetaan kebutuhan dan formasi tenaga pengajar secara menyeluruh. **(Agus L)**

Bupati Indramayu Perjuangkan 4.269 PPPK, Dorong Dana APBN

INDRAMAYU, (NN).-Bupati Indramayu Lucky Hakim terus memperjuangkan nasib ribuan tenaga pendidik berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Paruh Waktu (PW). Salah satu yang kini didorong pemerintah daerah adalah adanya dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Langkah tersebut dinilai penting mengingat jumlah tenaga PPPK dan Pegawai Paruh Waktu di lingkungan pendidikan Kabupaten Indramayu mencapai ribuan orang. Mereka menjadi bagian penting dalam menopang keberlangsungan pelayanan pendidikan di sekolah-sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu, Caridin, mengatakan perjuangan tersebut terus dilakukan Bupati Lucky Hakim agar pemerintah pusat memberikan respons maksimal terhadap kebutuhan pembiayaan para tenaga pendidik tersebut.

Hal itu disampaikan Caridin saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat



(28/8/2026) lalu.

“Pak Bupati terus berupaya memperjuangkan para guru PPPK dan pegawai paruh waktu agar mendapatkan perhatian dan respons maksimal dari pemerintah pusat. Harapannya, pembiayaan mereka bisa sesegera mungkin mendapatkan dukungan dari APBN,” ujar Caridin.

Caridin merinci, berdasarkan data yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indram-

ayu, terdapat 4.269 tenaga PPPK dan Pegawai Paruh Waktu. Jumlah tersebut terdiri dari 2.391 PPPK dan 1.878 Pegawai Paruh Waktu.

Menurut Caridin, jumlah tersebut menggambarkan besarnya peran tenaga PPPK dan Pegawai Paruh Waktu dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Indramayu. Mereka berada di garis depan pelayanan pendidikan dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan peser-

ta didik.

Karena itu, persoalan pembiayaan dan kesejahteraan mereka menjadi perhatian yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Pemerintah daerah, kata dia, berkepentingan memastikan para tenaga pendidik tersebut memperoleh kepastian sehingga dapat menjalankan tugas secara optimal. “Jumlahnya cukup besar, ada 4.269 orang. Mereka semua memiliki peran dalam pelayanan pendidikan. Karena itu, bagaimana pemerintah bisa memberikan kepastian kepada mereka menjadi hal yang sangat penting,” katanya.

Caridin menegaskan, upaya yang dilakukan Bupati Lucky Hakim merupakan bagian dari ikhtiar pemerintah daerah untuk mencari solusi terbaik bagi para tenaga pendidik, sekaligus memastikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.

Menurutnya, dukungan pemerintah pusat akan menjadi bagian penting dalam memperkuat pembiayaan tenaga pendidik di daerah. Dengan adanya dukungan tersebut,

beban pembiayaan daerah dapat lebih tertangani dan di sisi lain para guru mendapatkan kepastian dalam menjalankan tugasnya.

“Kami berharap perjuangan Pak Bupati ini mendapat respons positif dari pemerintah pusat. Intinya, para guru ini membutuhkan kepastian agar bisa menjalankan tugas dengan tenang dan memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal kepada masyarakat,” tutur Caridin.

Ia menambahkan, perhatian terhadap guru bukan semata-mata persoalan anggaran, tetapi juga menyangkut keberlangsungan kualitas pendidikan. Guru yang memiliki kepastian dalam status dan pembiayaan diharapkan dapat lebih fokus menjalankan tugas mendidik dan membentuk generasi masa depan.

Pemerintah Kabupaten Indramayu, lanjut Caridin, akan terus membangun komunikasi dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan agar aspirasi 2.391 PPPK dan 1.878 Pegawai Paruh Waktu tersebut mendapat perhatian pemerintah pusat. (***)

Bulog Jamin Stok Beras Aman hingga Akhir Tahun

KOTA BANDUNG (NN).- Perum Bulog Cabang Bandung menjamin ketersediaan beras dapat mencukupi kebutuhan masyarakat di Bandung Raya hingga akhir tahun 2026.

Pimpinan Bulog Cabang Bandung Yanto Nurdianto menyebutkan per Kamis ini stok beras yang dikuasai oleh Bulog mencapai 25 ribu ton dan cukup aman untuk kebutuhan hingga akhir Desember 2026.

“Bulog Cabang Bandung pada saat ini memiliki stok kurang lebih 25 ribu ton. Kemudian stok itu akan terus bertambah karena masih dilakukan penyerapan gabah dari petani,” kata Yanto kepada media, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, ketersediaan beras diperkirakan semakin kuat karena proses penyerapan gabah dan beras petani masih berlangsung hingga akhir tahun.

“Mudah-mudahan target penyerapan gabah terpenuhi, sekarang sudah mencapai 93 persen dari target 72 ribu ton. Mudah-mudahan sampai dengan akhir tahun Bulog Bandung masih terus menambah stoknya,” kata dia.

Yanto mengatakan stok yang tersedia saat juga cukup untuk memenuhi kebutuhan penyaluran beras Program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Ia menambahkan apabila terjadi kekurangan stok, Bulog Cabang Bandung dapat memperoleh pasokan tambahan dari Kantor Bulog lain di wilayah Jawa Barat. Selain menjaga ketersediaan stok, Bulog Bandung juga terus menyalurkan beras Program SPHP melalui pasar tradisional maupun pasar modern di Kota Bandung untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

Bulog juga bekerja sama dengan pemerintah daerah menggelar operasi pasar beras dan pasar murah dengan harga sesuai harga eceran tertinggi (HET).

“Untuk masyarakat saat ini juga kami tidak menyarankan adanya ‘panic buying’. Tidak perlu ada kekhawatiran karena memang stok sangat aman,” katanya. **(Wa Usep)**

FTBI Tingkat Kecamatan Kadipaten Digelar, Diikuti Sekitar 200 Peserta

KAB. TASIKMALAYA, (NN).- Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) tingkat Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, dilaksanakan pada Kamis, 27 Agustus 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung PGRI Pengurus Cabang Kecamatan Kadipaten dan SD Pamoyanan 1.

Dalam kegiatan tersebut hadir Pengawas Sekolah, Ketua PGRI, para kepala sekolah, guru pendamping, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Ketua Panitia Pelaksana FTBI Kecamatan Kadipaten, Sri Handayani, S.Pd.I., mengatakan kegiatan tersebut diikuti kurang lebih 200 peserta yang terdiri dari wanoja dan jajaka dari 20 sekolah dasar (SD).

“FTBI tahun ini mempertandingkan tujuh mata lomba, yaitu pupuh, sajak, dongeng, carpon, borangan, biantara, dan aksun. Pelaksanaannya dibagi di dua tempat, yakni SD Pamoyanan 1 dan Gedung PGRI,” ujar Sri Handayani.

Menurutnya, kegiatan FTBI diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri para peserta sekaligus menjadi motivasi bagi siswa lainnya untuk turut mengembangkan kemampuan dalam bidang bahasa dan

budaya Sunda.

“Kami berharap anak-anak yang mengikuti lomba ini ke depannya semakin percaya diri dan dapat menjadi motivasi bagi teman-temannya. Siswa yang menjadi juara di tingkat kecamatan nantinya dapat mengikuti FTBI tingkat kabupaten dan meraih prestasi, sesuai harapan kita semua,” paparnya.

Sementara itu, Pengawas Sekolah, Ristiany, S.Pd., mengapresiasi para kepala sekolah dan guru yang terlibat dalam kepanitiaan sehingga kegiatan FTBI dapat terselenggara dengan sukses, tertib, dan terorganisir dengan baik, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan.

Dikatakan Ristiany, kegiatan FTBI merupakan salah satu program pemerintah melalui Dinas Pendidikan yang bertujuan menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air, bahasa, serta melestarikan budaya daerah.

“Sejak dini, siswa perlu memahami dan menguasai berbagai bahasa, baik bahasa Inggris, bahasa Indonesia, maupun bahasa Sunda. Hal ini penting agar bahasa Sunda tidak hilang dan kita tetap dapat mempertahankan budaya serta kebudayaan yang kita miliki,” pungkasnya. **(Ade)**



Rapat Tahunan DPC HPSI Garut Berjalan Lancar

GARUT (NN).— Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Garut Himpunan Pencak Silat Indonesia (HPSI) Gajah Putih Mega Paksi Pusaka Pusat sukses melaksanakan Rapat Tahunan dan Apresiasi Kegiatan pada Jumat, 28 Agustus 2026.

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPC Kabupaten Garut, Kang Buchori. Rapat diikuti jajaran pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC), Ranting, dan Sektor se-Kabupaten Garut.

Rapat tahunan tersebut menjadi momentum penting bagi jajaran organisasi untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan, sekaligus memperkuat konsolidasi dan menyusun komitmen bersama dalam rangka meningkatkan kemajuan organisasi, khususnya di wilayah Kabupaten Garut.

Kegiatan semakin istimewa dengan hadirnya jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HPSI Gajah Putih Mega Paksi Pusaka Pusat. Hadir Ketua Umum Abah Ujer, Sekretaris Jenderal Abah Eep Hanafiah, Bendahara Umum Abah Nasep Anuronil Arif, serta Penasehat DPC Kabupaten Garut, Gangan Husnul Muamar.

Kehadiran jajaran pimpinan pusat tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat tali silaturahmi antara pengurus pusat dan daerah.

Selain itu, pertemuan juga menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi serta membangun kesamaan visi dalam menjalankan roda organisasi.

Ketua DPC Kabupaten Garut, Kang Buchori, melalui kegiatan tersebut mengajak seluruh jajaran pengurus untuk terus menjaga kekompatan dan menjalankan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab.

Rapat tahunan juga diharapkan dapat menjadi langkah positif dalam meningkatkan soliditas seluruh jajaran HPSI Gajah Putih Mega Paksi Pusaka Pusat di Kabupaten Garut.

Dengan semangat persaudaraan, seluruh pengurus diharapkan terus berkomitmen menjaga persatuan, melestarikan seni dan budaya pencak silat, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Melalui semangat “Bersatu, Bersama, Berkembang”, HPSI Gajah Putih Mega Paksi Pusaka Pusat diharapkan semakin solid, berkembang, maju, dan mampu berkontribusi dalam pelestarian seni budaya pencak silat di Kabupaten Garut. **(Aki Koneron)**

Garut-DPRD Sepakati Percepatan Perbaikan Jalan Banjarwangi



GARUT (NN).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut bersama DPRD Kabupaten Garut menyepakati percepatan penanganan jalan di wilayah Banjarwangi, Singajaya, hingga Peundeuy.

Kesepakatan tersebut dibahas dalam audiensi Bupati Garut, Abdusy Syukur Amin, bersama Gerakan Masyarakat Banjarwangi Singajaya Peundeuy (Gema BSP) di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Kamis (20/8/2026) lalu.

Bupati Garut, Abdusy Syukur Amin, menyampaikan bahwa pemerintah daerah menyerap aspirasi masyarakat yang menginginkan penanganan jalan dilakukan secepatnya agar lebih layak dan aman dilintasi.

"Kita diskusi sangat hangat, alot dan juga masing-masing bercerita tentang harapannya, dan ujungnya kami bersepakat bahwa untuk sementara untuk jangka pendek kita akan bantu selesaikan supaya jalan lebih layak untuk dilewati. Jadi tidak bisa berpotensi menyebabkan kecelakaan dan lain-lain," ujar Syukur.

Menurut Syukur, untuk jangka pendek, pemerintah daerah akan melakukan penambalan pada sejumlah jalur yang masih mengalami kerusakan. Di sisi lain, ungkapnya, Pemkab Garut juga mendorong realisasi program Inpres Jalan Daerah (IJD) sepanjang 6,5 kilometer.

Pemkab Garut, tambah Syukur, telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,5 miliar pada tahun 2026 dan

berkomitmen menuntaskan seluruh jalur hingga Peundeuy pada tahun 2027.

"Tetapi dulu kami beranggapan bahwa kami ingin jalan yang berkualitas nasional, tapi dari aspirasi masyarakat kelihatannya pengen segera diperbaiki dengan kondisi yang tidak usah jalan yang sangat bagus pokoknya layak saja," ucapnya. Mengakses Layanan Informasi Publik

Syukur menyebutkan, penganggaran dan penetapan jalur akan difinalisasi pada penetapan anggaran bulan Oktober mendatang.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Garut, Agus Muhammad Sutarman, menegaskan dukungan jajaran legislatif dan Badan Anggaran (Banggar) untuk mengawal pengerjaan jalan tersebut dari Januari hingga November 2027.

"Jadi gini, kan sudah kesepakatan, sudah dibilang oleh Pak Bupati bahwa yang penting layak. Kita tidak ideal kayak dari pusat, dengan yang tidak begitu ideal, bukan arti yang tidak ideal tapi yang penting mulus bagus itu akan tertutupi insha Allah akan tertutupi," katanya. **(Linda)**

Kejari Limpahkan Kasus Kredit BPR Bank Cirebon ke Pengadilan

CIREBON (NN).- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon, Jawa Barat, telah melimpahkan perkara dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan pencairan kredit Perumda BPR Bank Cirebon ke Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Cirebon Roy Andhika S. Sembiring di Cirebon, Kamis, mengatakan pelimpahan perkara dilakukan sejak Rabu (26/8) lalu terhadap tiga terdakwa berinisial DG, ZA, dan AS.

"Penuntut umum pada Kejari Kota Cirebon telah melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus," katanya.

Ia menyampaikan DG merupakan mantan Direktur Utama Perumda BPR Bank Cirebon, ZA selaku Kepala Bagian Kredit, dan AS yang merupakan mantan Direktur Operasional.

Perkara tersebut, kata dia, berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan dalam pemberian serta pencairan kredit pada Perumda BPR Bank Cirebon selama periode 2017 hingga 2024.

Roy mengatakan hasil penyidikan menemukan, adanya dugaan proses pemberian dan pencairan kredit yang tidak sesuai prosedur.

"Penyimpangan yang ditemukan antara lain penggunaan identitas pegawai dan debitur, analisis serta persetujuan kredit secara proforma,



dan pelengkapan dokumen setelah pencairan," ujarnya.

Selain itu, ia menyampaikan para terdakwa diduga menggunakan dana kredit tidak sesuai dengan tujuan sebagaimana tercantum dalam pengajuan dan pencairan kredit.

Dalam proses penyidikan, Kejari Kota Cirebon telah memeriksa 72 orang saksi dan dua orang ahli untuk mengungkap dugaan penyimpangan tersebut.

Ia mengemukakan berdasarkan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, perkara tersebut mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp17,35 miliar.

Setelah pelimpahan berkas perkara, kata dia, penuntut umum menunggu penetapan hari sidang dari majelis hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut. **(Tendi)**

KDS Dorong APKASI Expo Perluas Jejaring dan Promosi Daerah

KAB. TANGERANG, (NN).- Bupati Bandung, Dadang Supriatna yang juga Ketua Harian Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menghadiri pembukaan Apkasi Otonomi Expo 2026 di ICE BSD, Tangerang Selatan, Kamis (27/8/2026) lalu.

Bupati yang akrab disapa KDS ini hadir bersama Ketua Dekranasda Kabupaten Bandung, Emma Dety Permanawati dalam ajang yang mempertemukan pemerintah kabupaten dari berbagai daerah di Indonesia dengan dunia usaha, investor, dan mitra pembangunan tersebut.

KDS mengatakan, APKASI Otonomi Expo merupakan momentum penting bagi pemerintah kabupaten untuk memperkenalkan berbagai potensi unggulan daerah sekaligus membuka peluang kolaborasi dan investasi.

"Hari ini, APKASI mengadakan Apkasi Otonomi Expo di ICE BSD, Tangerang Selatan. Saya ucapkan sukses untuk seluruh bupati se-Indonesia," ujar KDS.

Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang promosi produk unggulan daerah, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat jejaring antarpemerintah kabupaten serta membangun konektivitas dengan dunia usaha dan calon investor.

Kabupaten Bandung juga turut berpartisipasi dalam ajang tersebut dengan membawa sejumlah produk



unggulan daerah, salah satunya kopi.

KDS menilai, keikutsertaan Kabupaten Bandung dalam ajang tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas promosi, memperkuat jejaring, serta membuka akses pemasaran yang lebih luas bagi produk-produk unggulan daerah.

Sementara itu, Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi menegaskan bahwa expo tersebut tidak sekadar menjadi tempat memamerkan produk daerah. Menurutnya, potensi yang dimiliki setiap kabupaten perlu didukung dengan akses pasar dan investasi.

Ia juga mendorong adanya kemudahan regulasi agar investor dapat lebih mudah bekerja sama secara langsung dengan pemerintah daerah.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto turut menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam mengembangkan produk unggulan yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Produk yang ditawarkan daerah, menurutnya, perlu dipersiapkan dengan baik agar memiliki daya saing dan peluang pasar yang lebih luas. Hal tersebut juga perlu diperkuat melalui kerja sama antardaerah.

Dengan demikian, APKASI Otonomi Expo diharapkan tidak hanya menjadi etalase produk unggulan daerah, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi terbentuknya berbagai kerja sama strategis antara pemerintah daerah, pelaku usaha, investor, dan mitra pembangunan. **(Asep)**

Ari Budiman Gelar Reses III di Desa Nyalindung

SUMEDANG, (NN).-Anggota DPRD Kabupaten Sumedang sekaligus politisi muda partai Golkar, menggelar reses III masa sidang 2025/2026, yakni di GOR Desa Nyalindung, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Selasa 25 Agustus 2026 lalu.

Anggota Komisi 1, Ir. Ari Budiman, ST, MT, dalam kunjungan resesnya mengatakan, bahwa masa reses merupakan kewajiban bagi setiap anggota DPRD turun ke Dapilnya, dalam rangka menjangkau informasi dan menghimpun aspirasi.

"Alhamdulillah, hari ini kami masih bisa bertatap muka langsung bersama para kader, konstituen dan masyarakat sekitar, di Dapil 2," kata kang Ari usai giat tersebut.

Sisi lain, sebutnya, sebagai anggota dewan tetap berkewajiban menyerap aspirasi untuk menjadi bahan

catatan, terutama kaitannya dengan tata kelola pemerintahan, keamanan hingga perizinan.

"Nah, tadi aspirasi yang masuk itu kebanyakan di permasalahan infrastruktur, baik perbaikan jalan maupun jaringan irigasi," ungkap anggota Komisi 1 DPRD secara umum membidangi urusan pemerintahan, hukum, dan aparaturnegara.

Sementara terpisah, diungkapkan Yogaswara, selaku Plt PK Surian, bahwa kehadirannya sebagai bagian dari tokoh masyarakat atau konstituen di Dapil 2 (Kecamatan Cimalaka, Cisarua, Tanjungkerta, Tanjungsmedar, Buahdua dan Surian).

"Kan ini mah kewajiban seorang anggota dewan secara keseluruhan, tidak terfokus ke Partai Golkar saja. Saya juga pernah merasakan anggota DPRD Sumedang tahun periode 2004-2009," paparnya. **(Lilis)**



:: Bupati Anwar Sadat Tutup OPD Cup II 2026

Setda-Diskan FC Raih Juara Pertama

TANJAB BARAT (NN).—Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., secara resmi menutup OPD Cup II Tahun 2026 dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-81 dan Hari Jadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke-61, Senin (24/08) lalu.

Kegiatan penutupan berlangsung di Gelora Bhakti Karya (Persitaj) Tanjung Jabung Barat tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Sekretaris Daerah, kepala OPD terkait, unsur Forkopimda, Ketua GOW Tanjab Barat, Ketua KONI Tanjung Jabung Barat, serta para peserta dan pendukung pertandingan.

Rangkaian penutupan diawali pertandingan perebutan juara III dan IV antara Bank 9 Jambi Cabang Kuala Tungkal menghadapi Satpol PP Tanjab Barat. Pertandingan berlangsung sengit dan berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan Satpol PP Tanjab Barat.

Selanjutnya, pertandingan final perebutan juara I dan II mempertemukan Setda-Diskan FC dengan Disdik FC. Kedua tim tampil maksimal hingga pertandingan harus ditentukan melalui adu penalti.

Setda-Diskan FC akhirnya berhasil keluar sebagai juara pertama setelah memenangkan adu penalti dengan skor 4-2 sekaligus memastikan diri sebagai kampiun OPD Cup II Tahun 2026.

Dalam sambutannya, Bupati Anwar Sadat menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam menyaksikan pelaksanaan OPD Cup II Tahun 2026.

Menurut Bupati, kegiatan olahraga antarlembaga pemerintah daerah tidak hanya menjadi ajang kompetisi untuk meraih prestasi, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi, membangun kebersamaan, serta meningkatkan semangat spor-



tivitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

"Melalui kegiatan seperti ini, kita tidak hanya mencari siapa yang menjadi juara, tetapi yang paling utama adalah bagaimana kita membangun kebersamaan, mempererat silaturahmi dan menjaga sportivitas di antara

seluruh OPD di Kabupaten Tanjung Jabung Barat," ujar Bupati.

Ia juga mengapresiasi seluruh tim yang telah mengikuti pertandingan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dan kebersamaan sejak awal hingga pertandingan final.

Bupati berharap semangat keber-

samaan yang terbangun melalui OPD Cup dapat terus dipertahankan dan diwujudkan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan berakhirnya pertandingan final, rangkaian OPD Cup II Tahun 2026 secara resmi ditutup. Kegiatan tersebut menjadi salah satu rangkaian dalam memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-81 dan Hari Jadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke-61.

Hasil akhir OPD Cup II Tahun 2026:

- Juara I: Setda-Diskan FC
- Juara II: Disdik FC
- Juara III: Satpol PP Tanjab Barat
- Juara IV: Bank 9 Jambi Cabang Kuala Tungkal

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan medali kepada wasit dan para pemenang, serta foto bersama.

Pelaksanaan OPD Cup II diharapkan tidak hanya memberikan hiburan dan semangat kompetisi, tetapi juga semakin memperkuat kekompakan dan kebersamaan antarlembaga dalam mendukung pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. **(RUSDIANSYAH)**

Balap Pompong Meriahkan HUT RI ke-81 dan HUT Tanjab Barat ke-61

KUALA TUNGKAL, (NN).—Ribuan masyarakat memadati kawasan Wisata Water Front City (WFC) Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Sabtu (22/8/2026) lalu, untuk menyaksikan kemeriahan Presisi Merdeka Balap Pompong dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia dan Hari Jadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke-61 Tahun 2026.

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 13.00 WIB tersebut diikuti 72 peserta dan disaksikan sekitar 2.000 masyarakat.

Sejumlah unsur Forkopimda dan pejabat daerah turut hadir, di antaranya Bupati Tanjab Barat Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., Wakil Bupati Dr. H. Katamso SA, S.E., M.E., Kapolres Tanjab Barat AKBP Maulia Kuswicaksono, S.I.K., M.H., Dandim 0419/Tanjab Letkol Inf. Zulhiardi, S.I.P., M.Han., serta Wakapolres Tanjab Barat Kompol Andi Musahar, S.H., M.H.

Balap pompong menjadi salah satu kegiatan yang mengangkat kearifan lokal dan budaya bahari masyarakat pesisir Tanjab Barat.

Selain menjadi hiburan bagi masyarakat, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk mempererat silaturahmi, mendukung perekonomian masyarakat dan UMKM, serta memperkenalkan WFC Kuala Tungkal sebagai salah satu destinasi wisata bahari daerah.

Dalam sambutannya, Kapolres Tanjab Barat AKBP Maulia Kuswicaksono menyampaikan bahwa lomba balap pompong bukan sekadar perlombaan, tetapi menjadi sarana pelestarian budaya dan tradisi masyarakat pesisir.

"Lomba pompong ini bukan hanya sekadar perlombaan, tetapi merupakan wujud pelestarian budaya, semangat kebersamaan dan sportivitas masyarakat Kuala Tungkal. Melalui kegiatan ini, kita juga mengajak masyarakat untuk lebih mencintai



sungai sebagai sumber kehidupan," ujar Kapolres.

Kapolres juga mengajak seluruh peserta menjunjung tinggi sportivitas serta mengingatkan masyarakat yang menyaksikan perlombaan untuk tetap menjaga ketertiban dan keselamatan selama kegiatan berlangsung.

Sementara itu, Bupati Tanjab Barat Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., mengapresiasi pelaksanaan lomba balap pompong yang dinilai memiliki ciri khas tersendiri bagi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi bagi para nelayan dan masyarakat, tetapi juga berpotensi menjadi daya tarik wisata yang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari dalam maupun luar daerah.

"Balap pompong merupakan salah satu aktivitas lomba yang menjadi ciri khas Kabupaten Tanjab Barat dan memiliki keunikan tersendiri. Kegiatan seperti ini harus terus dilestarikan sebagai bagian dari kearifan lokal dan tradisi masyarakat," kata Bupati.

Perlombaan menggunakan rute sepanjang 1 kilometer dengan lebar lintasan 50 meter.

Peserta menggunakan pompong

berbahan kayu dengan ketentuan keselamatan, termasuk penggunaan jaket pelampung. Setiap babak race hanya meloloskan satu peserta ke babak berikutnya hingga memasuki babak final.

Setelah melalui seluruh tahapan perlombaan, panitia menetapkan hasil sebagai berikut:

- Juara I: Peserta Nomor 24
- Juara II: Peserta Nomor 28
- Juara III: Peserta Nomor 53
- Juara Harapan I: Peserta Nomor 51
- Juara Harapan II: Peserta Nomor 16
- Juara Harapan III: Peserta Nomor 43

Selain hadiah utama berupa tiga unit sepeda motor dan tiga unit sepeda listrik, panitia juga menyediakan berbagai hadiah dan doorprize bagi peserta serta masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut turut disalurkan 150 paket bantuan sosial yang masing-masing berisi satu dus mi, satu liter minyak goreng, dan lima kilogram beras.

Untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan tertib, pengamanan dilakukan personel Polres Tanjab Barat bersama instansi terkait. **(RUSDIANSYAH)**

3.000 Rumah Jambi Dibedah, Bantuan 2027 Naik Rp 23 Juta

JAMBI (NN).—Upaya peningkatan kualitas perumahan rakyat di Provinsi Jambi membuahkan hasil. Sepanjang tahun 2025–2026, lebih dari 3.000 rumah warga berhasil diperbaiki melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya / BSPS atau yang dikenal Bedah Rumah.

Program yang diperjuangkan ini adalah BSPS/Bedah Rumah dengan nilai bantuan Rp 20 juta per penerima. Bantuan tersebut digunakan masyarakat untuk memperbaiki rumah agar lebih layak, aman, dan nyaman untuk ditempati.

Program ini diperuntukkan bagi masyarakat Provinsi Jambi yang rumahnya tidak layak huni.

Pihak yang memperjuangkan aspirasi ini menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan warga.

Penyaluran bantuan mencakup seluruh wilayah Provinsi Jambi dengan total penerima lebih dari 3.000 kepala keluarga.

Program telah berjalan sepanjang

tahun 2025 hingga 2026. Kabar baiknya, program ini Insyaallah akan kembali dilanjutkan pada tahun 2027.

Tujuan utama program ini adalah untuk membantu masyarakat memiliki rumah yang layak huni. Namun disadari bahwa nilai Rp 20 juta belum cukup menutupi seluruh biaya perbaikan, sehingga semangat gotong royong warga sangat diperlukan dalam bentuk material, tenaga, maupun dukungan lainnya.

Untuk 2027, pemerintah berencana meningkatkan nilai bantuan menjadi Rp 23 juta per penerima. Dengan kenaikan ini diharapkan cakupan penerima semakin luas dan manfaatnya semakin besar bagi masyarakat Jambi.

"Kita berharap dengan adanya peningkatan bantuan ini, semakin banyak keluarga di Jambi yang bisa merasakan rumah layak huni. Mari kita jaga semangat gotong royong agar program ini tepat sasaran dan bermanfaat," Edi Purwanto. **(RUSDIANSYAH)**



Milangkala ke-143 Gunungleutik, Meriah Penuh Kebersamaan

KAB. BANDUNG (NN).- Pemerintah Desa Gunungleutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, menggelar peringatan Milangkala Desa ke-143 yang dirangkaikan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kegiatan yang melibatkan masyarakat dari berbagai wilayah di Desa Gunungleutik tersebut berlangsung meriah di lapangan sepak bola Desa Gunungleutik, Sabtu (29/8/2026) lalu.

Beragam kegiatan digelar untuk memeriahkan peringatan, mulai dari bazar ekstra UMKM, karnaval, lomba liwet, senam sehat SKJ, gerak jalan sehat, Amazing Race, gerakan operasi bersih (opsih), lomba karaoke, Social Investment, hiburan rakyat bobodoran Sunda, pentas kreasi seni, hingga pertunjukan Wayang Golek.

Sejak pagi, warga beramai-ramai memadati lapangan sepak bola Desa Gunungleutik. Mereka tidak hanya menyaksikan, tetapi juga turut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dikemas menarik, penuh kegembiraan, dan sarat kebersamaan.

Panitia juga menyediakan beragam hadiah serta ratusan door-

prize bagi peserta yang beruntung. Hal tersebut semakin menambah semangat kegiatan dan membuat antusiasme warga terus terjaga hingga seluruh rangkaian acara selesai.

Kepala Desa Gunungleutik, Agus Hamdani, S.IP., mengatakan bahwa kegiatan Milangkala Desa merupakan agenda rutin tahunan yang menjadi momentum untuk mengenang sejarah sekaligus mempererat silaturahmi antara pemerintah desa dan masyarakat.

"Alhamdulillah, pada hari ini, Sabtu, 29 Agustus 2026, kami Pemerintah Desa bersama lembaga desa, para tokoh, serta seluruh elemen masyarakat melaksanakan agenda rutin tahunan, yaitu Milangkala Desa ke-143 sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81," ujar Agus.

Menurutnya, Milangkala Desa bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk mengenang jasa para pendahulu dan pelopor yang telah memberikan pengabdian terbaik bagi Desa Gunungleutik.

"Dengan adanya agenda rutin tahunan ini, kita kembali mengingat se-



jarah para pelopor yang sudah memberikan yang terbaik untuk Desa Gunungleutik. Kita juga mengingat para pendahulu yang mungkin sudah meninggal dunia. Mari kita doakan bersama agar mereka mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT. Tentunya, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi yang mudah-mudahan diridai Allah SWT," tuturnya.

Agus berharap, kegiatan Milangkala Desa dapat terus dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk penghormatan kepada para mantan kepa-

la desa, mantan anggota BPD, mantan ketua RT dan RW, mantan ketua DKM, serta seluruh tokoh dan warga yang pernah memberikan pengabdian kepada masyarakat.

"Kami berharap setiap tahun agenda Milangkala Desa ini terus dilaksanakan, sehingga kita tidak melupakan sejarah dan selalu berdoaan orang-orang yang pernah menjadi pengurus maupun tokoh masyarakat, mulai dari mantan kepala desa, mantan BPD, mantan ketua RT, RW, mantan ketua DKM, serta semuanya yang telah melayani dan memberikan pengabdian kepada pemerintah dan masyarakat. Semoga yang masih diberikan kesehatan, sementara keluarga dan para pendahulu yang telah meninggal dunia semoga mendapat tempat terbaik di surga Allah SWT," harapnya.

Ia menambahkan, peringatan Milangkala Desa ke-143 yang dirangkaikan dengan HUT RI ke-81 juga menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

"Pada intinya, melalui agenda rutin Milangkala Desa ke-143 sekaligus

HUT RI ini, kita tidak boleh melupakan sejarah dan jasa para pahlawan yang telah merebut dan memperjuangkan kemerdekaan. Mari kita doakan para pahlawan agar mendapat tempat terbaik di surga Allah SWT," katanya.

Agus juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia dan pihak yang telah terlibat dalam menyaksikan rangkaian kegiatan tersebut. "Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada panitia yang telah melaksanakan kegiatan dari awal sampai akhir. Semoga seluruh pengorbanan dan kerja kerasnya menjadi amal jariyah di sisi Allah SWT," pungkasnya.

Sementara itu, Babinsa Desa Gunungleutik, anggota Koramil 2408/Ciparay, Sertu Susanto, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Desa Gunungleutik dan masyarakat yang telah bersama-sama menyaksikan kegiatan tersebut.

Ia berharap peringatan Milangkala Desa tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga mampu memperkuat kebersamaan, silaturahmi, dan semangat gotong royong masyarakat. **(Agus R)**

SMPN 2 Ngamprah Rusak dan Tak Terawat...

< DARI HALAMAN 1

Menurutnya, kerusakan ringan pada fasilitas sekolah dengan total 29 ruangan semestinya masih dapat ditangani melalui pemanfaatan dana BOS secara optimal.

"Ya, tadi saya menanyakan kenapa bisa terjadi seperti ini, padahal sekolah ini pernah memenangkan juara 1 Adiwiyata tingkat nasional. Ini kenapa bisa sampai seperti ini, akhirnya ke mana dana BOS-nya?" ujar Jeje kepada wartawan.

Atas kondisi tersebut, Jeje meminta Inspektorat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pengelolaan dana BOS di SMPN 2 Ngamprah.

Langkah itu dinilai penting untuk memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara transparan dan sesuai peruntukannya.

Jeje mengatakan, setelah men-

erima informasi mengenai kondisi sekolah yang viral di media sosial, dirinya langsung meminta Dinas Pendidikan (Disdik) KBB melakukan pengecekan ke lapangan.

Dari hasil pengecekan awal Disdik, diketahui terdapat tiga ruang kelas yang mengalami kerusakan sedang hingga berat.

Selain itu, fasilitas toilet juga dinilai sudah tidak layak digunakan.

Kondisi papan tulis yang kurang baik serta kebersihan lingkungan sekolah yang tidak terawat turut menjadi perhatian.

"Hari ini saya mengunjungi langsung SMPN 2 Ngamprah yang beberapa hari lalu sempat ramai dibicarakan karena kondisinya cukup memprihatinkan," kata Jeje.

Saat informasi tersebut mulai viral, Jeje mengaku langsung memanggil Pelaksana Tugas (Plt) Kepala

Dinas Pendidikan untuk segera meninjau lokasi dan melaporkan hasil pemeriksaan.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat berkomitmen segera memperbaiki tiga ruang kelas yang mengalami kerusakan dari total 29 ruangan yang ada di sekolah tersebut.

"Alhamdulillah tadi saya pantau sudah ada progres. Toiletnya juga sudah. Saya juga menggandeng dari REI, Pak Norman, melalui program CSR-nya untuk membantu merehabilitasi toilet-toilet yang ada di KBB," ujar Jeje.

Pemerintah daerah selanjutnya akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan, termasuk mengevaluasi pengelolaan dana BOS dan memastikan perbaikan fasilitas sekolah berjalan sesuai kebutuhan.

(Tim NN)

Revitalisasi SMPN 2 Cimanggung...

< DARI HALAMAN 1

"Rangka baja ringan yang lama masih bagus. Anggaran yang semula untuk pengadaan baja ringan dialihkan untuk pembelian keramik lantai," ujarnya.

Sementara itu, Rudiana menilai terdapat sejumlah dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan proyek revitalisasi tersebut. Menurutnya, berbagai temuan di lapangan perlu dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang maupun Kementerian Pendidikan agar dilakukan evaluasi. "Jika memang terdapat kegagalan dalam pelaksanaan proyek, hal itu perlu ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang," katanya.

Diketahui, proyek revitalisasi SMP Negeri 2 Cimanggung merupakan bagian dari Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 yang bersumber dari

APBN dengan nilai anggaran sebesar Rp2.498.000.000. Pekerjaan tersebut memiliki masa pelaksanaan selama 120 hari kalender.

Selain itu, saat awak media melakukan peninjauan ke lokasi, kepala sekolah selaku penanggung jawab kegiatan swakelola tidak berada di tempat. Konsultan pengawas juga tidak terlihat di lokasi, begitu pula pihak-pihak yang disebut terlibat langsung dalam pelaksanaan pekerjaan. Menurut salah seorang warga setempat, apabila program pemerintah tidak dilaksanakan secara transparan, maka pihak yang paling dirugikan adalah masyarakat dan para siswa sebagai pengguna fasilitas pendidikan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak terkait masih diharapkan memberikan tanggapan dan klarifikasi secara resmi. **(Tim NN)**

KDM Dorong Parpol Kawal Pembangunan Jawa...

< DARI HALAMAN 1

Anton menjadi calon tunggal setelah memperoleh dukungan dari 27 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan Musda digelar lebih cepat dari jadwal semula untuk mempercepat penataan organisasi partai di Jawa Barat. Saat ini, masa kepengurusan baru berjalan selama empat tahun empat bulan.

"Musda ke-VI Partai Demokrat Jawa Barat ini melalui Musdalub, karena kepengurusan baru 4 tahun 4 bulan. Tapi penyelenggaraan Musda berdasarkan AD/ART, kewenangannya berada di Ketua Umum," kata Herman.

Menurut Herman, perubahan jadwal Musda merupakan kewenangan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.



la menjelaskan hingga batas akhir pendaftaran hanya terdapat satu calon yang memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat periode 2026-2031, yakni Anton Sukartono Suratto.

Anton memperoleh dukungan dari 27 DPC serta satu organisasi sayap Par-

tai Demokrat. "Sampai batas pendaftaran hanya ada satu calon yang dapat dukungan 27 DPC serta satu organisasi sayap. Karena hanya calon tunggal, pelaksanaan musda berjalan lebih cepat dan Anton ditetapkan secara aklamasi untuk selanjutnya diusulkan ke ketua umum," ujarnya. **(RED)**

Tak Sanggup Bekerja

< DARI HALAMAN 1

Pada kesempatan tersebut, Prabowo menghadiri peluncuran dan groundbreaking Program PLTS 100 GWp di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa-Bali, Gilimanuk, Jembrana. Menteri Sekretaris Negara Praseityo Hadi mengatakan program tersebut merupakan bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional Klaster Kemandirian Energi dan Air. Program ini ditujukan untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil.

Praseityo menyebut Prabowo telah menginstruksikan agar pembangunan PLTS berkapasitas total 100 GWp dipercepat dan ditargetkan selesai pada 2029. Program tersebut diperkirakan dapat menghasilkan efisiensi biaya listrik hingga Rp73,9 triliun per tahun.

Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan PLTS sebesar 30 GWp serta penghentian operasional pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) sebesar 13 GW.

Indonesia sendiri memiliki potensi energi surya sekitar 3.294 GWp. Namun, kapasitas PLTS yang telah terpasang hingga April 2026 baru mencapai sekitar 1,5 GWp. Pembangunan PLTS 100 GWp akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama ditargetkan mencapai 17 GWp, tahap kedua 18 GWp, dan tahap ketiga 30 GWp. Selain meningkatkan ketahanan energi, program tersebut diharapkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui investasi di sektor pembangkit, baterai, dan jaringan listrik. Pemerintah juga menargetkan penguatan industri solar photovoltaic (PV) dalam negeri. **.(RED)**

KH Abdul Hakim Mahfudz Terpilih Pimpin PBNU 2026-2031

JOMBANG (NN).—Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, telah menetapkan pimpinan baru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk masa khidmat 2026–2031. KH Abdul Hakim Mahfudz, yang akrab disapa Gus Kikin, terpilih sebagai Ketua Umum PBNU.

Keputusan tersebut disampaikan KH Anwar Iskandar dalam sidang pleno Muktamar ke-35 NU pada Senin (31/8/2026) lalu.

Menurutnya, anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) telah mencapai kesepakatan secara mufakat untuk menetapkan Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU.

Sebelum keputusan AHWA, para muktamirin terlebih dahulu melakukan pemungutan suara untuk menyaring lima kandidat dengan perolehan suara tertinggi. Gus Kikin menempati posisi teratas setelah memperoleh 472 suara.

Empat kandidat lainnya yang masuk lima besar adalah KH Zulfa Mustofa dengan 262 suara, KH Abdussalam Sochib sebanyak 261 suara, KH Yahya Cholil Staquf dengan 258 suara, serta KH Abdul Ghofar Rozin yang memperoleh 155 suara.

Kelima nama tersebut kemudian diserahkan kepada sembilan anggota AHWA untuk dimusyawarahkan. Musyawarah berlangsung secara

tertutup pada Senin pagi, mulai pukul 06.20 WIB hingga 07.00 WIB. Hasilnya, AHWA menetapkan KH Abdul Hakim Mahfudz sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026–2031.

Dengan keputusan tersebut, Muktamar ke-35 NU telah menetapkan jajaran pimpinan utama PBNU untuk lima tahun ke depan. Selain Gus Kikin sebagai Ketua Umum, forum muktamar juga menetapkan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU periode 2026–2031.

Rangkaian Muktamar ke-35 NU selanjutnya akan ditutup pada Senin. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri langsung acara penutupan tersebut. **(RED)**



Peringati HUT ke-81 RI, Ketua DPRD dan Forkopimda OKU Gelar Upacara

BATURAJA (NN).—Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), H. Sahril Elmi, membacakan naskah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) OKU.

Upacara berlangsung khidmat di Taman Kota Baturaja, Senin (17/8/2026) pagi lalu. Bupati OKU, H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd., bertindak sebagai inspektur upacara.

Peringatan HUT ke-81 RI tersebut menjadi momentum untuk mengenang sekaligus menghargai jasa para pahlawan dan pejuang bangsa yang telah berkorban dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.

Upacara dihadiri jajaran Forkopimda OKU, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), unsur TNI-Polri, pelajar, serta masyarakat. Pengibaran Bendera Merah Putih berlangsung khidmat dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Selain itu, puluhan anggota DPRD OKU turut menghadiri upacara. Kehadiran tersebut menjadi bentuk komitmen bersama dalam



meneruskan perjuangan para pendahulu bangsa serta mewujudkan cita-cita pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten OKU.

“Kita memperingati 17 Agustus bukan hanya sebagai seremoni. Ini merupakan pengingat bahwa kemerdekaan diraih melalui pengorbanan. Tugas kita sekarang adalah mengisinya dengan pembangunan dan pelayanan terbaik untuk rakyat,” ujar Ketua DPRD OKU.

Tema peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini adalah “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.”

Dalam kesempatan tersebut, pembacaan UUD 1945 juga menjadi bagian penting dalam mengingat kembali landasan konstitusional ke-

hidupan berbangsa dan bernegara. Pembukaan UUD 1945 memuat norma fundamental negara serta nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, sementara batang tubuh UUD 1945 mengatur berbagai aspek kehidupan ketatanegaraan, termasuk sistem pemerintahan, hak asasi manusia, dan kedaulatan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional Indonesia.

Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian penghargaan serta atraksi yang ditampilkan oleh para pelajar se-Kabupaten OKU.

Seluruh rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI berlangsung lancar, khidmat, dan tertib dengan pengamanan dari unsur TNI-Polri. **(ADV)**



Lima Asgar Siap Gebrak Super League 2026/2027

GARUT (NN).—Garut kembali menunjukkan konsistensinya dalam melahirkan talenta sepak bola. Dari waktu ke waktu, sejumlah pesepak bola asal Garut atau yang akrab disebut Asgar terus menghiiasi kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Pada musim 2026/2027, setidaknya terdapat lima pemain asli Garut yang dipastikan memperkuat klub-klub peserta Super League. Kehadiran mereka melanjutkan tradisi panjang pesepak bola Asgar yang telah berkiprah di level tertinggi, bahkan hingga membela Timnas Indonesia.

Sebelumnya, Garut pernah melahirkan sejumlah nama besar seperti Adeng Hudaya, Uut Kuswendi, Nova Zaenal, Zaenal Arief, Johan Juansyah, hingga Yandi Sofyan.

Berikut lima pemain asli Garut yang akan tampil di Super League musim 2026/2027:

1. Ardi Ramdani

Ardi Ramdani merupakan pesepak bola kelahiran Kecamatan Cilawu, Garut, pada 28 Desember 1997. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah tersebut kini dipercaya menjadi kapten Isenmulang Kalteng FC, klub promosi yang akan berlaga di Super League.

Perjalanan profesional Ardi dimulai dari Persigar Garut pada 2017. Setelah itu, ia sempat memperkuat Persikota Tangerang dan PSGC Ciamis sebelum bergabung dengan Isenmulang FC pada 2020.

2. Rendi Saepul

Nama berikutnya adalah Rendi Saepul, winger muda yang memperkuat Persijap Jepara. Musim 2026/2027 menjadi tahun kedua bagi Rendi tampil di kasta tertinggi sepak bola Indonesia bersama Persijap.

Rendi lahir di Garut pada 21 Mei 2005 dan diketahui berasal dari Kecamatan Pakenjeng. Sebelum bergabung dengan Persijap Jepara, ia sempat memperkuat Perkesit Tjianjoer dan Nusantara United FC.

3. Ripal Wahyudi

Ripal Wahyudi menjadi salah satu pemain yang cukup dikenal dalam



daftar ini. Musim depan, gelandang bertahan kelahiran Kecamatan Malangbong, Garut, 10 Oktober 2000, akan memperkuat Dewa United Banten FC setelah sebelumnya bermain untuk Semen Padang FC.

Ripal juga merupakan adik dari pesepak bola nasional Akbar Zakaria, yang pada musim sebelumnya bermain untuk Persikota Tangerang.

Bergabung dengan Dewa United menjadi tantangan baru bagi Ripal. Ia berharap dapat memberikan kontribusi terbaik untuk klub barunya pada musim ini.

4. Fitrul Dwi Rustapa

Garut juga memiliki wakil di posisi penjaga gawang melalui Fitrul Dwi Rustapa. Kiper kelahiran Kecamatan Bungbulang, Garut, 5 Juni 1995, tersebut akan menjalani musim ketiganya di Super League bersama Dewa United FC. Sepanjang karier profesionalnya, Fitrul pernah memperkuat sejumlah klub, di antaranya Persipura Jayapura, Persegres Gresik, dan Persib Bandung.

5. Miraj Rizky Sulaeman

Nama terakhir adalah Miraj Rizky Sulaeman, talenta muda asal Garut yang digadang-gadang sebagai salah satu pemain potensial.

Miraj lahir di Kecamatan Bayongbong, Garut, pada 30 Juli 2009. Ia berposisi sebagai gelandang serang dan pernah menjadi bagian dari Timnas Indonesia U-17. **(RED)**